

**IMPLEMENTASI NILAI MODERASI BERAGAMA  
DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT HARMONIS  
DI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR  
KABUPATEN BANYUMAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial**

**Oleh :**

**Charis Zain Fathoni  
1717102056**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
JURUSAN MANAJMEN DAN KOMUNIKASI ISLAM (MKI)  
FAKULTAS DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Charis Zain Fathoni

NIM : 1717102056

Jenjang : S-1

Fakultas : Dakwah

Jurusan : Manajemen dan Komunikasi Islam (MKI)

Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)


Judul Skripsi : Implementasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Membangun Masyarakat Harmonis di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran dan juga bukan terjemahan. Hal hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini diberi tanda sanitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Purwokerto, 29 Januari 2024

Saya menyatakan,



  
Charis Zain Fathoni

NIM. 1717102056



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, [www.uinpszu.ac.id](http://www.uinpszu.ac.id)

**PENGESAHAN**

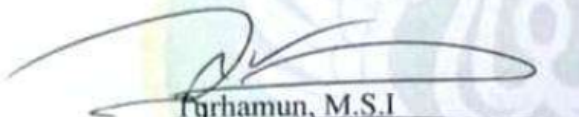
Skripsi Berjudul:


**IMPLEMENTASI NILAI MODERASI BERAGAMA  
DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT HARMONIS  
DI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS**

Yang disusun oleh: Charis Zain Fathoni NIM. 1717102056, Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diajukan pada: Kamis, 21 Maret 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Pembimbing,

Sekretaris Sidang/Penguji II,

  
Furhamun, M.S.I  
NIP.198702022019031011


  
Nurul Khotimah, M.Sos  
NIP. 199408152023212041

Penguji Utama,

  
Alfi Nur'aini, M.Ag  
NIP.199307302019082001

Mengetahui,  
Dekan, 23 April 2024



  
Dr. Muskinul Fuad, M.Ag  
NIP.197412262000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, [www.uinsaizu.ac.id](http://www.uinsaizu.ac.id)

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan perbaikan seperlunya terhadap penulisan skripsi dengan:

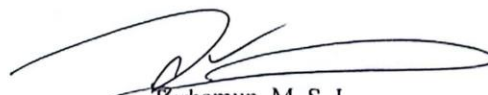
Nama : Charis Zain Fathoni  
NIM : 1717203056  
Jenjang : S1  
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Jurusan : Manajemen dan Komunikasi Islam  
Fakultas : Dakwah  
Judul Skripsi : "Implementasi Nilai Moderasi Beragama Dalam membangun Masyarakat Harmonis di Purwokerto Timur"

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 29 Januari 2024  
Pembimbing,

  
Kurhamun, M.S.I.  
NIP. 19870202 201903 1 011

**IMPLEMENTASI NILAI MODERASI BERAGAMA  
DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT HARMONIS  
DI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS**

**CHARIS ZAIN FATHONI**

NIM. 1717102056

Jurusan Manajemen dan Komunikasi Penyiaran Islam  
Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

**ABSTRAK**

Implementasi moderasi beragama menjadi suatu syarat penting dalam rangka membangun masyarakat yang harmonis. Moderasi beragama diartikan sebagai pendekatan yang mengamalkan ajaran agama secara moderat, menekankan nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan penerimaan terhadap keberagaman agama. Fokus penelitian terletak pada peran kunci pemerintah dalam mengimplementasikan nilai moderasi beragama sebagai strategi untuk menciptakan kerukunan dan toleransi antarumat beragama. Penelitian ini menyoroti pentingnya moderasi beragama dalam membangun masyarakat harmonis dan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran krusial dalam menyelenggarakan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung nilai-nilai moderasi beragama.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait implementasi nilai moderasi beragama di Purwokerto Timur. Hasil penelitian menunjukkan langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Purwokerto Timur. Kepala camat mendorong partisipasi aktif pegawai pemerintahan, memperkuat kesatuan melalui upacara bendera, dan bekerja sama dengan komunitas beragama dalam perayaan hari raya. Langkah-langkah preventif, seperti mendirikan forum kewaspadaan dini dan monitoring keamanan, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap ketentraman masyarakat.

***Kata kunci: Implementasi, Moderasi Beragama, Masyarakat Harmoni***

**IMPLEMENTATION OF RELIGIOUS MODERATION VALUES  
IN BUILDING A HARMONIOUS SOCIETY  
IN EAST PURWOKERTO DISTRICT, BANYUMAS REGENCY**

**CHARIS ZAIN FATHONI**

NIM. 1717102056

Islamic Management and Communication Departemen Da'wah Faculty State  
Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

**ABSTRACT**

The implementation of religious moderation is an important condition in order to build a harmonious society. Religious moderation is defined as an approach that practices religious teachings in a moderate manner, emphasizing the value of tolerance, respect for differences, and acceptance of religious diversity. The focus of the study lies on the key role of the government in implementing the value of religious moderation as a strategy to create harmony and tolerance among religious communities. This study highlights the importance of religious moderation in building a harmonious society and shows that the government has a crucial role in implementing policies, programs, and activities that support the values of religious moderation.

The research method used is qualitative with descriptive analytical approach, involving in-depth interviews, observations, and analysis of documents related to the implementation of the value of religious moderation in East Purwokerto. The results showed concrete steps taken by the Government of East Purwokerto. The head of the sub-district encouraged the active participation of government employees, strengthened unity through flag ceremonies, and collaborated with religious communities in the celebration of hari raya. Preventive measures, such as establishing early warning forums and security monitoring, demonstrate the government's commitment to public order.

***Keywords: Implementation, Religious Moderation, Harmony Society***

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 053b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ža	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

## 3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	Ĥikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

## 4. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	kasrah	Ditulis	i
-----	d'ammah	Ditulis	u

## 5. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
Dlammah + wāwu mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	<i>furūd'</i>



## 6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai
	Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au
	Ditulis	<i>qaul</i>

## 7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## 8. Kata Sandang Alif+Lam

### a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan mengguntelah huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## **MOTTO**

“Mereka yang mencari kematian akan hidup. Mereka yang mencari hidup akan mati”

-Yi Sun-Shin



## **PERSEMBAHAN**

Karya tulis ini dipersembahkan untuk:

Charis Zain Fathoni selaku penulis, atas berkat pertolongan Allah sehingga diberi kemampuan untuk menyelesaikan satu karya tulis sederhana ini. Sekaligus selamat yang telah berhasil melawan diri sendiri dari segala bentuk kemalasan. Bapak, ibu, Para Guru, Kaka dan Adik sepupu dan para sahabat. Semua ini juga karena pelajaran, do'a dan dukungan mereka. Serta untuk almamater tercinta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh harapan dan keridhaan dan ampunan Allah SWT. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beserta sahabat. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafa'at pertolongannya di akhirat kelak.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1) Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto guna memperoleh gelar S. Sos. Skripsi berjudul “Implementasi Nilai Moderasi Beragama dalam Membangun Masyarakat Harmonis di Purwokerto Timur” akhirnya dapat terselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak. Bersamaan dengan selesainya penyusunan ini, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Muskinul Fuad, M. Ag., Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Ahmad Muttaqin, M. Si., Wakil Dekan I Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Alief Budiono, M. Pd., Wakil Dekan II Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Nawawi, M. Hum., Wakil Dekan III Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Dr. H. Musta'in, M. Si., Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingannya
7. Turhamun, M. Si., Selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

9. Bapak Solichin dan Ibu Tri Nur Hidayah selaku kedua orang tua penulis serta segenap keluarga yang selalu mendoakan, memberikan dukungan lahir dan batin sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dimanapun mereka berada
10. Teman-teman KPI angkatan 2017 yang telah berjuang bersama dan telah memberikan banyak motivasi sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan penelitian ini
11. Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Walisongo yang telah menerima dan memberikan kesempatan saya untuk berproses, berkembang, membangun relasi dan pembelajaran seputar manajemen Organisasi.
12. Pemerintah Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas yang senantiasa mendukung penulis sampai terselesaikannya penulisan skripsi.
13. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan balasan yang terbaik.

Semoga segala doa, bantuan, dukungan, motivasi serta bimbingan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka penulis sangat mengharapkan kritik serta saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga bagi semua pihak. Amiin.

Purwokerto, 21 Februari 2024

Penyusun,

Charis Zain Fathoni

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Dasar Implementasi .....	15
1. Pengertian Implementasi.....	15
2. Implementasi Menurut Para Ahli.....	16
3. Analisis Kualitas Implementasi .....	22
B. Konsep Dasar Moderasi Beragama.....	24
1. Pengertian Moderasi Beragama .....	24
2. Prinsip Dasar Moderasi .....	27

3. Indikator-indikator Moderasi Beragama .....	29
C. Konsep Dasar Masyarakat.....	33
1. Pengertian Masyarakat .....	33
2. Klasifikasi Masyarakat.....	35
D. Konsep Dasar Harmonisasi .....	37
1. Pengertian Harmonisasi .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Waktu Penelitian .....	41
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	42
E. Jenis dan Sumber Data .....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Penyajian dan Keabsahan Data.....	46
H. Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Objek Penelitian .....	52
B. Deskripsi Data Penelitian .....	54
C. Analisis Data Penelitian .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
C. Penutup.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk .....	54
Tabel 4.3 Agama Penduduk .....	54





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Daftar Informan Wawancara Langsung
Lampiran 3	Hasil Dokumentasi Kecamatan Purwokerto Timur
Lampiran 4	Surat Ijin Riset
Lampiran 5	Blangko Bimbingan Skripsi
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Implementasi moderasi penting dalam beragama menjadi prasyarat utama untuk membangun masyarakat yang harmonis. Negara ini, yang memiliki jumlah Muslim terbanyak di dunia. Negara ini, dengan jumlah penduduk Muslim yang paling besar di seluruh dunia menghadapi tantangan unik akibat keberagaman agama yang kompleks. Moderasi beragama diartikan sebagai usaha untuk mengamalkan ajaran agama dengan sikap yang moderat, menekankan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan penerimaan terhadap keberagaman agama. Dalam konteks keberagaman agama di Indonesia, dengan hadirnya komunitas Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama-agama lainnya, moderasi beragama menjadi jembatan untuk membaurkan perbedaan-perbedaan tersebut.

Upaya moderasi beragama bukan hanya sebatas penyatuan pemahaman antarumat beragama, tetapi juga merupakan kunci untuk menjaga keharmonisan di tengah perbedaan keyakinan. Dengan memahami dan menghormati perbedaan agama, masyarakat Indonesia dapat membangun fondasi yang kokoh untuk kerjasama dan persatuan. Seiring dengan semakin kompleksnya dinamika keberagaman, implementasi moderasi beragama diharapkan dapat menciptakan lingkungan sosial yang inklusif, di mana semua warga negara merasakan keadilan, kedamaian, dan persatuan sebagai bagian integral dari kehidupan bersama.

Dengan keberagaman etnis, budaya dan agama yang kaya, indonesia telah lama dianggap sebagai teladan bagi negara-negara lain dalam menjalani kehidupan multikultural yang harmonis. Salah satu prinsip kunci yang mendasari harmoni sosial di indonesia adalah moderasi beragama. Moderasi beragama memiliki sejarah panjang dalam islam dan juga tercermin dalam budaya tradisi masyarakat indonesia. Pertama, perlu disebutkan bahwa agama islam masuk ke indonesia sebagian besar ditempuh melalui jalur damai. Berbeda dengan perkembangan islam di beberapa kawasan di arab maupun

eropa yang di tempuh melalui jalur peperangan atau perluasan wilayah. Islam masuk ke indonesia melalui jalur perdagangan, kesenian, perkawinan. Dengan demikian islam telah masuk kepada jantung kebudayaan masyarakat indonesia. Pada sisi lain islam masuk ke indonesia tidaklah menjelma menjadi seperangkat hukum atau aturan yang kaku. Hal ini sejalan dengan karakter para penyebar islam di nusantara yang beraliran sufistik dan berorientasi pada spiritual.

Pendekatan-pendekatan sufistik yang tidak formal hitam-putih inilah yang menyebabkan islam diterima dengan baik tanpa menyebabkan gejolak yang berarti. Dengan demikian, legitimasi moderasi sesungguhnya berasal dari realitas umat islam sendiri. Moderasi beragama dengan demikian sudah mengakar lama bahkan sebelum indonesia berdiri dan merupakan seperangkat dan pangkal dari integrase masyarakat. moderasi beragama melambangkan sekaligus bentuk dari kesadaran akan harmoni harmoni dalam perbedaan sekaligus pemahaman atas batasan yang tidak boleh dilanggar.<sup>1</sup>

Sikap moderasi ini mengedepankan keterbukaan terhadap perbedaan, pengakuan, bersikap toleran, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Sejarah moderasi beragama dapat ditelusuri kembali pada masa awal islam. Para pendahulu kita termasuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabat telah mencontohkan sikap moderasi dalam beragama. Mereka berlaku adil terhadap sesamanya tanpa memandang latar belakang agama, ras, suku, dan bahasa. Moderasi beragama juga tercermin dalam ajaran islam yang mengedepankan hubungan baik dengan Allah dan seluruh manusia, termasuk saudara seiman maupun saudara yang berbeda agama. Moderasi ini menekankan keterbukaan terhadap perbedaan dan menolak sikap menyalahkan atau mengkafirkan orang atau kelompok yang memiliki pandangan berbeda.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz, A. Khoirul Anam, *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021), hlm. 25-26

<sup>2</sup> Agus Akhmadi, *Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia*, Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 13, No. 2, Februari-Maret 2019, hlm. 7-11

Dalam masyarakat multikultural, interaksi sesama manusia cukup tinggi intensitasnya. Sehingga kemampuan sosial warga masyarakat dalam berinteraksi antar manusia perlu dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Kemampuan tersebut menurut Curtis mencakup tiga wilayah yaitu: affiliation (kerjasama), cooperation and resolution conflict (kerjasama dan penyelesaian konflik), kindness, care and affection / emphatic skill (keramahan, perhatian, dan kasih sayang). Keragaman yang terjadi di Indonesia seringkali berbuntut pada berbagai konflik. Konflik yang meledak secara sporadic di berbagai wilayah menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan dan betapa kentalnya prasangka antara kelompok, serta rendahnya saling pengertian antar kelompok. Dalam komunikasi horizontal antar masyarakat, Mulyana menyebutkan bahwa benturan antar suku masih berlangsung di berbagai wilayah, mulai dari sekedar stereotip dan pranksaka antar suku, diskriminasi, hingga ke konflik terbuka yang menimbulkan banyak korban, persaingan antar suku juga terjadi tidak hanya di tengah masyarakat, tetapi juga di kalangan elit politik dan akademisi.<sup>3</sup>

Agama berperan penting didalam berkehidupan bagi menata nilai-nilai tatanan kemanusiaan dan kemasyarakatan. Agama merupakan keperluan bagi jiwa dan sebagai spiritual untuk manusia dalam penyerahan diri kepada Illahi Rabbi. Dalam berbagai agama telah diajarkan perihal perkara kebaikan dan melarang perbuatan yang tidak baik atau kejahatan didalam hidupnya. Seruan agama dan penyampaian terhadap yang berbeda untuk saling rukun dan damai.<sup>4</sup> Meskipun agama memiliki potensi besar untuk mendukung moderasi beragama, tentu ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah penyalahgunaan ajaran agama yang seringkali digunakan untuk kepentingan politik atau ekstremisme. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama dan ajarannya untuk membedakan antara interpretasi yang benar dan yang ekstrem. Dengan mengikuti ajaran-ajaran

---

<sup>3</sup> Agus Akhmadi, *Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia ...*, hlm. 2

<sup>4</sup> Juwaini, dkk, "*Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural*", (Aceh: Bandar Publishing, 2023), hlm. 1

agama yang mengedepankan toleransi, perdamaian, dan cinta kasih, serta melalui dialog antar agama yang positif kita dapat mencapai masyarakat yang lebih harmonis dan menghormati perbedaan.

Dalam islam, moderasi beragama mengacu pada pemahaman dan pelaksanaan agama yang seimbang dan juga bertanggung jawab. Ini melibatkan sikap tengah dalam mejalani ajaran islam, dimana menjauhi ekstremisme dan juga fanatisme. Prinsip ini ditegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an yang menyatakan pentingnya menjalani agama dengan penuh kesederhanaan dan kesadaran. Islam mendorong umatnya untuk menjaga toleransi terhadap beragam pemahaman agama dan budaya. Rasulullah Muhammad SAW sendiri menunjukkan toleransi terhadap orang-orang dari berbagai latar belakang dan agama. Islam mendorong dialog antar agama sebagai sarana untuk memahami dan mempromosikan toleransi. Dalam Al-Qur'an surat Al Hujurat ayat 13 dijeaskan tentang pentingnya untuk saling toleransi, yakni:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”*

Ayat ini menekankan aspek-aspek penting tentang persatuan dan toleransi dalam masyarakat. Toleransi tercermin dalam ayat ini melalui ide saling mengenal, dimana keberagaman manusia diakui sebagai kebijaksanaan Allah. Lebih dari itu, keutamaan seseorang tidak terletak pada suku atau bangsa tertentu, melainkan pada tingkat ketakwaan dan ketaqwaan kepada Allah. Oleh karena itu, ayat ini mempromosikan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kesetaraan di antara umat manusia, dengan menekankan bahwa kehormatan sejati terletak pada kebajikan dan ketakwaan, bukan pada perbedaan identitas atau asal usul.

Melalui dialog yang baik, kita dapat memperkuat hubungan dengan penganut agama lain, memecahkan miskonsepsi, kerja sama yang saling menguntungkan, dan terpenting adalah mempromosikan perdamaian. Radikalisme dan ekstremisme adalah ancaman terhadap suatu negara terutama negara yang masyarakatnya yang plural. Selain itu radikalisme dan ekstremisme juga menjadi sebuah ancaman terhadap moderasi beragama. Islam mengancam keras tindakan kekerasan dan ekstremisme. Muslim yang menjalani moderasi beragama diharapkan untuk berkontribusi positif dalam masyarakat. kontribusi ini mencakup berperan aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik tanpa melupakan nilai-nilai islam.

Pelestarian nyawa manusia diutamakan, karena menghilangkan satu nyawa sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat. Konsep moderasi beragama sangat penting. Seiring berjalannya waktu, teks-teks keagamaan mengalami multitafsir dan gagasan tentang kebenaran menjadi relatif. Beberapa penganut suatu agama tidak lagi memegang teguh hakikat ajarannya, sehingga menimbulkan fanatisme terhadap versi kebenaran yang lebih mereka sukai. Untuk mengatasi tantangan tersebut, moderasi beragama dipandang sebagai solusi untuk mencegah konflik yang berakar pada agama dan menjaga eksistensi manusia. Pentingnya mengelola keberagaman agama dengan mengedepankan moderasi, menghormati keberagaman, dan menghindari ekstremisme dan intoleransi yang berujung pada kekerasan.

Ideologi ekstremis dapat mengarah pada tindakan kekerasan, terorisme, dan konflik bersenjata yang menyebabkan hilangnya nyawa, perusakan property dan pengungsian. Selain itu, perpecahan dalam masyarakat yang mengarah pada marginalisasi dan diskriminasi dapat mengakibatkan keresahan sosial, ketegangan serta rusaknya kohesi sosial. Ideologi ekstremis, seringkali mengabaikan hak asasi manusia. Pada akhirnya, hal ini bisa mengakibatkan penindasan terhadap kebebasan individu dan pelanggaran terhadap hak-hak dasar, baik itu individu maupun kelompok. Ekstremisme dan intoleransi juga dapat memperburuk hubungan antar umat beragama, karena

menyebabkan ketidakpercayaan dan rusaknya dialog serta kerja sama antar komunitas agama yang berujung pada permusuhan.<sup>5</sup>

Masyarakat harmonis adalah gagasan yang mendefinisikan sebuah komunitas dimana anggotanya hidup secara damai, hidup berdampingan dengan toleransi, saling kerja sama, dan rasa saling menghargai. Salah satu pilar masyarakat harmonis adalah toleransi terhadap perbedaan, ini melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kepercayaan dari latar belakang yang berbeda dalam suatu masyarakat. Keadilan dan kesetaraan adalah komponen penting lainnya, ketika setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mendapatkan hak-haknya, tentu ketidaksetaraan tersebut dapat diminimalisir.

Masyarakat harmonis adalah tujuan yang mulia untuk dikejar. Ini bukanlah tugas yang mudah, tetap dengan membangun fondasi toleransi, keadilan, pendidikan, kerja sama, dan penyelesaian konflik yang baik akan menjadikan masyarakat mencapai tingkat harmoni yang lebih tinggi. Harmoni sosial membawa dampak positif pada perkembangan individu maupun kelompok, kemakmuran ekonomi, dan perdamaian dunia secara keseluruhan. Implementasi nilai moderasi beragama merupakan langkah yang krusial dalam membangun masyarakat harmonis di tengah keragaman agama dan kepercayaan. Dengan menghormati pluralitas kepercayaan, menghindari konflik agama, mengedepankan prinsip keadilan, serta menerapkan berbagai inisiatif kolaborasi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih damai, inklusif, dan harmonis bagi setiap warga. Dalam dunia yang semakin kompleks, nilai moderasi beragama adalah kunci untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan berusaha bersama-sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

---

<sup>5</sup> Aliansi Peradaban Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Mengatasi Ekstremisme dan Intoleransi Beragama*, 2012 diperoleh dari [https://www.unaoc.org/wp-content/uploads/2012/12/Anddresing-Religious-Ekstremism-and-Intolerance .pdf](https://www.unaoc.org/wp-content/uploads/2012/12/Anddresing-Religious-Ekstremism-and-Intolerance.pdf) diakses pada Sabtu, 12 September 2023 Pada Pukul 08:56 WIB

Islam, mengajarkan dan mengedepankan moderasi beragama dengan mengedepankan keseimbangan, keselarasan, dan kelestarian hidup manusia. Hal ini mendorong umatnya untuk senantiasa mengamalkan keyakinannya sesuai dengan esensinya dan menghormati keunikan orang lain tanpa merasa terancam. Konsep ini sangat penting dalam masyarakat yang beragam seperti yang ada di Purwokerto Timur, dimana moderasi beragama menjadi solusi untuk mencegah konflik, menjaga martabat manusia, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Purwokerto Timur merupakan kecamatan di Kabupaten Banyumas. Wilayah ini terkenal karena keberagaman. salah satu bentuk keberagaman tersebut yaitu pemeluk agama di purwokerto timur mayoritas umat islam, namun terdapat juga umat beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha. Terdapat juga rumah peribadatan seperti terdapat 72 Masjid, 97 Mushola. 11 Gereja Protestan, 2 Gereja Katholik, 1 Wihara dan 1 Klenteng. Selain terdapat rumah peribadatan masing-masing agama, Purwokerto Timur juga sebagai satu-satunya kecamatan yang terdapat Rumah Pancasila. Rumah Pancasila tersebut merupakan bukti akan komitmen kebangsaan serta tingginya toleransi masyarakat Purwokerto Timur. Penelitian ini fokus pada peran pemerintah dalam mengimplementasikan nilai moderasi beragama sebagai strategi untuk menciptakan kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Pemerintah memiliki peran yang krusial dalam menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung nilai-nilai moderasi beragama.

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan di atas, moderasi beragama sangatlah penting dan berarti untuk diwujudkan di Purwokerto Timur agar terwujudnya hubungan masyarakat yang seimbang dan juga harmonis. Sehingga nantinya akan tercipta lingkungan yang damai dan aman dari konflik-konflik perbedaan. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang ***“Implementasi Nilai Moderasi Beragama dalam Membangun Masyarakat yang Harmonis di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas”***.



## **B. Penegasan Istilah**

### **1. Implementasi**

Implementasi adalah langkah konkret dalam menerapkan suatu rencana, kebijakan, atau nilai-nilai tertentu ke dalam praktik nyata atau kehidupan sehari-hari. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan keterampilan maupun nilai dan sikap.<sup>6</sup> Dalam konteks penelitian ini, implementasi yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Purwokerto yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Terutama keputusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Purwokerto Timur.

### **2. Moderasi Beragama**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi memiliki dua makna yaitu mengurangi kekerasan dan menghindari keekstreman. Moderasi Beragama merujuk pada sikap tengah atau pendekatan moderat terhadap praktik dan keyakinan keagamaan.<sup>7</sup>

Moderasi Beragama dalam penelitian ini meneliti tentang bagaimana nilai moderasi beragama yang mencakup komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodasi terhadap budaya local di terapkan melalui kebijakan dan program kerja oleh pemerintah kecamatan Purwokerto Timur.

### **3. Masyarakat Harmonis**

Masyarakat harmonis merujuk pada suatu kelompok sosial atau komunitas dimana terwujudnya keseimbangan, kerukunan, dan saling pengertian antar anggotanya. Masyarakat harmonis dalam penelitian ini merujuk pada sebuah entitas sosial di Purwokerto Timur di mana

---

<sup>6</sup> E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep implementasi*, Bnadung: PT Remaja Rosdakarya, 2003, hlm 93

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. (Jakarta: Bidang Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 15

masyarakat hidup secara damai, saling menghormati, dan bekerja sama tanpa adanya konflik yang berlarut-larut. Hal ini tercermin dalam interaksi yang harmonis, penerimaan terhadap keragaman, resolusi konflik yang konstruktif, perjuangan bersama untuk kesejahteraan, serta prinsip keadilan dan kesetaraan.

#### **4. Purwokerto Timur**

Purwokerto Timur dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

### **C. Rumusan Masalah**

#### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, yang mengacu pada implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam membangun masyarakat yang harmonis di kecamatan Purwokerto Timur adalah bagaimana implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam membangun masyarakat harmonis di kecamatan Purwokerto Timur.?

### **D. Tujuan Penelitian & Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu untuk mengkaji implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam membangun masyarakat harmonis di kecamatan Purwokerto Timur.

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kompherensif tentang implementasi nilai moderasi beragama dan menjadi bahan referensi bagi pemerintah, masyarakat, lembaga keagamaan, dan peneliti yang melakukan penelitian dibidang yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Fakultas Dakwah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian bagi mahasiswa serta menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian moderasi beragama di fakultas dakwah.

### b. Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam memperluas wawasan serta sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S.Sos.

## E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis tidak berperan sebagai pelopor pembahasan mengenai Implementasi Nilai Moderasi Beragama. Sebelumnya, penulis telah mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya dalam rangka menyusun skripsi. Walaupun begitu, penulis tidak sekadar mengulangi atau menduplikasi hasil karya terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya dijadikan sebagai referensi dan terdapat keterkaitan antara penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian sebelumnya. Penulis melakukan studi pustaka untuk memastikan adanya kesinambungan, baik dari segi judul, teori, maupun substansi dari penelitian yang akan diproses selanjutnya. Dari hasil studi, penulis menemukan beberapa karya terdahulu sebagai rujukan diantaranya:

Penelitian oleh Linda Ayu Safitri mahasiswa pascasarjana dari IAIN Curup pada tahun 2021 yang berjudul "*Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Pembentukan Karakter Religius Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam IAIN Curup*". Penelitian ini mengkaji tentang implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembentukan karakter religius mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam IAIN Curup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama yang diterapkan oleh dosen-dosen kepada mahasiswa yaitu melalui nilai tasamuh (toleransi), melalui nilai keadilan, melalui nilai syura (musyawarah), dan melalui nilai

kebangsaan.<sup>8</sup> Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang nilai moderasi beragama. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada subjek yaitu pembentukan karakter religious Manajemen Pendidikan Islam IAIN Curup.

Penelitian oleh Ihamsyah mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020 berjudul *"Implementasi Nilai Moderasi Beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu"*. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi nilai-nilai moderasi beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama yang diterapkan oleh guru-guru kepada peserta didik yaitu melalui nilai tasamuh (toleransi), melalui nilai keadilan, melalui nilai syura (musyawarah), dan melalui nilai kebangsaan.<sup>9</sup> Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi nilai moderasi beragama. Sedangkan perbedaan terletak pada subjek penelitian yaitu Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahoto.

Penelitian oleh Muhammad Fadhil mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2020 yang berjudul *"Moderasi Beragama Sebagai Landasan Dalam Membangun Masyarakat Harmonis: Analisis Kasus Pada Desa Simpang Empat"* Penelitian ini mengkaji tentang moderasi beragama sebagai landasan dalam membangun masyarakat harmonis di Desa Simpang Empat, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Simpang Empat telah menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari,

---

<sup>8</sup> Syafitri, Linda Ayu. *Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Pembentukan Karakter Religius Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam IAIN Curup*. Tesis. IAIN Curup. 2021

<sup>9</sup> Ihamsyah. *Implementasi Nilai Moderasi Beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*. Tesis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2020

sehingga tercipta masyarakat yang harmonis.<sup>10</sup> Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang moderasi beragama. Sedangkan perbedaan terletak pada subjek penelitian yaitu Analisis kasus pada Desa Simpang Empat.

Penelitian berjudul "*Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Kehidupan Masyarakat Desa di Kabupaten Banyuwangi*" oleh Nurul Aini tahun 2020. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat desa di Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama telah diterapkan oleh masyarakat desa di Kabupaten Banyuwangi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis.<sup>11</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang nilai-nilai moderasi beragama. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yaitu kehidupan masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulis akan menyusun pembahasan dalam proposal ini dengan mengikuti sistematika pembahasan yang telah ditentukan, dengan tujuan untuk memberikan gambaran pokok penelitian. Berikut adalah struktur sistematika yang akan diikuti:

**Pertama**, Pendahuluan berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah dan Batasan Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, serta Sistematika Pembahasan.

**Kedua**, Kerangka Teori yang berisi penguraian mengenai Moderasi Beragama, Masyarakat, dan Harmonisasi.

---

<sup>10</sup> Fadhil, Muhammad. *Moderasi Beragama Sebagai Landasan Dalam Membangun Masyarakat Harmonis: Analisis Kasus Pada Desa Simpang Empat*. Tesis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2020

<sup>11</sup> Aini, Nurul. *Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Kehidupan Masyarakat Desa di Kabupaten Banyuwangi*. Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2020

**Ketiga**, Metode Penelitian yang berisi metode dan jenis penelitian yang digunakan, subjek dan objek dari penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

**Keempat**, Deskripsi lokasi dan waktu penelitian, Pembahasan terkait dengan gambaran Moderasi Beragama di Purwokerto Timur, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi nilai moderasi beragama di Purwokerto Timur. serta deskripsi hasil penelitian.

**Kelima**, Penutup, berisi penutup disertai kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Dasar Implementasi**

##### **1. Pengertian Implementasi**

Asal kata 'implementasi' berasal dari bahasa Inggris, yaitu 'to implement', yang berarti menerapkan. Istilah ini digunakan untuk menjalankan suatu tindakan yang menghasilkan dampak atau konsekuensi terhadap suatu hal. Secara sederhana, implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Brownie dan Wildavsky menggambarkan implementasi sebagai perluasan aktivitas yang saling beradaptasi. Syaukani menganggap implementasi sebagai rangkaian aktivitas dengan tujuan menyampaikan kebijakan kepada masyarakat agar hasilnya sesuai harapan. Hanifah Harsono menyatakan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk mengubah kegiatan menjadi tindakan kebijakan dalam konteks administrasi.

Implementasi, menurut berbagai definisi dapat dipahami sebagai lebih dari sekadar aktivitas rutin. Ini merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilaksanakan dengan tekun, mengikuti acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penting untuk dicatat bahwa implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan elemen-elemen berikutnya. Sejalan dengan itu, kebijakan tidak hanya berupa keputusan semata untuk melaksanakan suatu tindakan, melainkan suatu langkah yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, kebijakan diarahkan pada apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan sekadar menggambarkan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Dengan demikian, implementasi dan kebijakan membentuk suatu kesatuan yang terkait erat, mengarah pada pencapaian hasil dan tujuan yang diinginkan.

Sumaryadi menambahkan bahwa ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu:

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
- 2) Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan, atau peningkatan.
- 3) Unsur pelaksanaan (implementor) baik organisasi atau individu untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.<sup>12</sup>

Penting untuk memahami bahwa kesuksesan pelaksanaan program atau kebijakan tidak hanya tergantung pada perumusan kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada implementasi yang efektif dan keterlibatan target group. Oleh karena itu, penyelenggaraan program atau kebijakan yang baik memerlukan koordinasi yang baik antara semua elemen terlibat. Keseluruhan, pemahaman holistik terhadap hubungan antara program atau kebijakan, target group, dan implementor akan membantu mencapai tujuan yang diinginkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

## 2. Implementasi Menurut Para Ahli

### 1. Implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan tindakan yang digunakan baik individu atau kelompok-kelompok pejabat pemerintah atau swasta yang diarahkan agar dapat tercapainya suatu tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan keduanya mengandaikan bahwa suatu implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan public, implementor dan kinerja kebijakan.

Meter dan Horn mengemukakan suatu model dasar yang mencakup enam variable yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja. Dalam model ini, variable terikat adalah

---

<sup>12</sup> Noman Mamonto, dkk. *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (STUDI) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*. EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018, hlm. 3-4 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/21950>



kinerja yang didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana standar-standar dan tujuan kebijakan yang direalisasikan. Adapun variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Standard dan tujuan (standards and objectives)
- b. Sumber daya (keuangan dan resource)
- c. Karakteristik organisasi pelaksana (characteristics of the implementing agencies)
- d. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas penguatan (interorganizational communication and enforcement activities)
- e. Sikap para pelaksana (disposition of implementors)
- f. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik (economic, social and political conditions)

Faktor-faktor tersebut selain terkait dengan kinerja kebijakan, juga saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

## 2. Teori Implementasi Kebijakan Sabatier dan Mazmanian

Mazmanian dan Sbatier mengembangkan model control efektif dan pencapaian. Menurutnya, pendekatan sebuah tahapan-tahapan kebijakan tidak dapat membantu untuk memahami proses dalam pembuatan kebijakan karena pendekatan ini membagi suatu proses menjadi serangkaian bagian yang tidak artifisial dan realistis. Oleh sebab itu, dari sudut pandang ini dalam implementasi dan pembuatan kebijakan menjadi satu proses yang sama. Sabatier dan Mazmanian mendukung sintesis gagasan teoritis topdown dan bottom-up menjadi enam syarat yang dapat mencukupi dan harus ada agar implementasi yang efektif dari tujuan kebijakan telah dinyatakan secara legal. Enam syarat tersebut adalah:

- 1) Tujuan yang jelas dan konsisten, sehingga dapat menjadi standar evaluasi dan sumber daya.

- 2) Teori kausal yang memadai dan dapat memastikan untuk kebijakan itu mengandung suatu teori yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan perubahan.
- 3) Struktur implementasi yang disusun secara legal supaya membantu pihak-pihak yang akan mengimplementasikan kebijakan dan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.
- 4) Para pelakasa implementasi yang ahli dan berkomitmen yang menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan.
- 5) Dukungan dari kelompok kepentingan dan penguasa di legislative dan eksekutif.
- 6) Perubahan dan kondisi sosial ekonomi yang tidak melemahkan dukungan kelompok dan penguasa atau tidak dapat meruntuhkan teori kausal yang mendasari kebijakan.

Selanjutnya pada tahun 1986 Sabatier memodifikasi model mereka, berdasarkan riset di Eropa dan Amerika mereka mengembangkan kerangka implementasi kebijakan, mengidentifikasi tiga variabel bebas (independen variabel) yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

- 1) Mudah atau sulitnya mengendalikan masalah yang dihadapi, meliputi indikator:
  - a. Keragaman perilaku kelompok sasaran.
  - b. Kesuksesan teknis
  - c. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.
  - d. Presentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk.
- 2) Kemampuan dalam kebijakan untuk mensistematisasikan proses dalam implementasinya, dengan indikator:
  - a. Kejelasan dan konsistensi tujuan.
  - b. Keterpaduan hirarki dalam dan diantara lembaga pelaksana.
  - c. Aturan keputusan dari badan pelaksana.

- d. Ketepatan alokasi sumber daya.
  - e. Rekrutmen pejabat pelaksana.
  - f. Akses pihak luar secara formal.
- 3) Pengaruh langsung variabel politik/kepentingan terhadap tujuan yang termuat dalam kebijakan yang meliputi indikator sebagai berikut:
- a. Dukungan politik.
  - b. Kondisi sosia ekonomi dan teknologi.
  - c. Dukungan dari pejabat atasan.
  - d. Sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok.
  - e. Komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.

Suatu tahap proses implementasi kebijakan public yang menggunakan lima tahapan yang terdiri dari:

- 1) Pemahaman tentang lembaga/badan pelaksana dalam bentuk tersusunnya kebijakan pelaksana.
- 2) Hasil yang nyata.
- 3) Penerimaan atas hasil nyata.
- 4) Kepatuhan terhadap objek.
- 5) Tahapan yang mempengaruhi pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan baik sebagian maupun keseluruhan yang bersifat mendasar.

Menurut Mazmanian dan Sabatier, ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

### 3. Teori Model Politik Administrasi dari Grindle

Grindle berpendapat bahwa tugas implementasi adalah menentukan mata rantai yang menentukan arah kebijakan umum yang direalisasikan sebagai suatu hasil dari aktifitas pemerintahan. Dalam

terminology Grindle, kebijakan diartikan sesuatu yang bermanfaat untuk mencapai tujuan yang dieksplorasi dalam bentuk kebijakan tersebut. Sedangkan Wibawa mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. Pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dihasilkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi actor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerimaan implementasi, arena konflik yang mungkin terjadi diantara para actor implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Dalam hal ini, kebijakan pemerintahan diterjemahkan kedalam program tindakan guna mencapai tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan tersebut. Program tindakan itu sendiri dapat dijabarkan lagi kedalam proyek-proyek spesifik yang mudah dilaksanakan. Proses implementasi hanya dapat dimulai apabila arah kebijakan umum dan

tujuan sudah dinyatakan secara spesifik, program tindakan sudah didesain dan dana telah dialokasikan untuk pelaksanaannya.<sup>13</sup>

Secara keseluruhan, teori implementasi memegang peran kunci dalam memahami dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh empat indikator utama kualitas, yaitu dosis, ketepatan, kualitas penyampaian, dan penerimaan. Dosis mencerminkan sejauh mana program diterapkan, ketepatan mengukur konsistensi dengan rencana awal, kualitas penyampaian mengevaluasi efektivitas pelaksanaan, dan penerimaan mempertimbangkan dukungan dari pihak terlibat.

Dengan memahami dan mengukur aspek-aspek ini, pembuat kebijakan dan pelaksana dapat lebih efektif menilai dan meningkatkan hasil dari suatu inisiatif. Keseluruhan, kualitas implementasi bukan hanya tentang menjalankan program, tetapi juga mengenai bagaimana program tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan diterima oleh masyarakat atau kelompok sasaran dengan maksimal.

### 3. Analisis Kualitas Implementasi

Analisis kualitas implementasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan empat indikator utama, yaitu dosis, ketepatan, kualitas penyampaian, dan penerimaan. Berikut penjelasannya:

#### a. Dosis

Dosis mencerminkan sejauh mana nilai-nilai yang disertakan dalam sebuah kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah. Analisis dosis akan melibatkan penilaian terhadap sejauh mana nilai tersebut terintegrasi dalam kebijakan publik, regulasi, dan kegiatan sosialisasi. Dapat diukur dari seberapa sering dan seberapa kuat nilai moderasi beragama dipromosikan dalam berbagai aspek pemerintahan.

---

<sup>13</sup> Ahmad Zubaidi dkk. *Imajinasi dan Refleksi Kritis Pengembangan Pendidikan Islam*. (Trenggalek: CV INDONESIA IMAJI, 2022), Cet. Ke-1, hlm. 92-99.

b. Ketepatan

Ketepatan mencakup sejauh mana implementasi nilai tersebut sesuai dengan kebutuhan dan konteks. Analisis akan memeriksa apakah nilai-nilai tersebut sesuai dengan keragaman agama yang ada di daerah tersebut dan sejauh mana mereka memberikan solusi konkret terhadap potensi konflik.

c. Kualitas Penyampaian

Kualitas penyampaian menilai efektivitas metode dan media yang digunakan oleh pemerintah dalam menyampaikan sebuah nilai. Analisis melibatkan evaluasi terhadap kejelasan pesan, keberlanjutan kampanye, serta keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.

d. Penerimaan

Penerimaan mencerminkan sejauh mana masyarakat menerima dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Analisis penerimaan akan melibatkan survei atau penilaian terhadap sikap dan perilaku masyarakat terkait dengan moderasi beragama, dengan memperhatikan apakah nilai-nilai tersebut tercermin dalam pola pikir dan tindakan sehari-hari.

Melalui analisis terhadap keempat indikator ini, dapat dihasilkan gambaran komprehensif mengenai kualitas implementasi. Evaluasi yang mendalam akan memberikan wawasan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi keberhasilan, potensi perbaikan, dan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan dampak positif dari implementasi.

## **B. Konsep Dasar Moderasi Beragama**

### **1. Pengertian Moderasi Beragama**

Kata moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti ke-sedang-an (tanpa kelebihan dan kekurangan). Istilah ini mencakup konsep penguasaan diri terhadap perilaku yang sangat berlebihan atau kurang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi

memiliki dua makna utama, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Lukman Hakim Saifuddin menggambarkan orang moderat sebagai individu yang bersikap wajar, biasa, dan tidak ekstrem. Dalam bahasa Inggris, *moderation* sering digunakan dengan arti rata-rata, inti, baku, atau tidak berpihak. Secara umum, sikap moderat menekankan keseimbangan dalam keyakinan, moral, dan watak, baik dalam berinteraksi dengan individu lain maupun dalam berhadapan dengan institusi negara. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang).<sup>14</sup>

Konsep moderasi beragama mengacu pada sikap atau pendekatan yang seimbang dan moderat dalam menjalani keyakinan agama. Orang yang mengadopsi sikap moderasi beragama cenderung menghindari ekstremisme dan fanatisme, serta mencari keseimbangan dalam pelaksanaan ajaran agama mereka. Moderasi beragama mencakup penerimaan terhadap perbedaan keyakinan, dialog antaragama, dan penolakan terhadap tindakan radikal yang dapat mengarah pada konflik atau kekerasan. Sikap ini mendorong toleransi, penghargaan terhadap kebebasan beragama, dan kerja sama antar komunitas beragama untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Moderasi beragama juga sering melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip ajaran agama dan bagaimana menerapkannya secara positif dalam kehidupan sehari-hari, tanpa mengesampingkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan perdamaian.

Secara mendasar moderasi sebenarnya sudah di ajarkan oleh Islam yang sudah tergambar dalam al-Quran. Dalam al-Qur`an istilah moderasi disebut dengan Al-Wasathiyah, namun juga terdapat perdebatan tentang

---

<sup>14</sup> Fauziah Nurdin. *Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist*, JURNAL ILMIAH AL MU'ASHIRAH: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif Vol. 18, No. 1, Januari 2021, hlm. 61

pemahaman moderasi di tinjau dalam konteks kekinian. Kata “al-wasathiyah” bersumber dari kata *al-wasth* (dengan huruf sin yang di-sukûn-kan) dan *al-wasath* (dengan huruf sin yang di-fathah-kan) keduanya merupakan isim mashdâr dari kata kerja *wasatha*. Secara sederhana, pengertian *Wasathiyah* secara terminologis bersumber dari makna-makna secara etimologis yang artinya suatu karakteristik terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan bersikap ekstrim.<sup>15</sup>

Istilah Al-Wasathiyah ini dapat ditemukan dalam beberapa ayat yang menekankan pentingnya sikap tengah dan seimbang dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu contoh yang sering dikutip adalah ayat dari Surah Al-Baqarah (2:143), yaitu:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا  
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَاقِبَةً  
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ  
لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menysia-nyikan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”.

Ayat tersebut mengandung pesan bahwa umat Islam diharapkan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam menjalankan ajaran agama. Pemahaman moderasi dalam Islam juga dapat ditemukan dalam konsep "ummatan wasathan" (umat yang adil dan seimbang), yang menekankan bahwa umat Islam diinstruksikan untuk

---

<sup>15</sup> Mhd. Abror. *MODERASI BERAGAMA DALAM BINGKAI TOLERANSI: Kajian Islam dan Keberagaman*. RUSDIYAH Jurnal Pemikiran Islam Volume 1 Nomor 2, Desember 2020. Hlm. 4 <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2i.174>



menjadi komunitas yang moderat dan tidak ekstrem dalam segala aspek kehidupan. Selain itu, prinsip moderasi juga tercermin dalam ajaran tentang penguasaan diri (self-control), kebijaksanaan, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Dalam banyak ayat, Al-Quran menekankan pentingnya menahan diri dari perilaku ekstrem, menghindari kecenderungan fanatisme, dan berusaha mencapai keseimbangan dalam segala hal. Meskipun istilah "Al-Wasathiyah" mungkin tidak selalu secara eksplisit disebutkan, konsep moderasi secara implisit terkandung dalam banyak ayat Al-Quran yang mengajarkan umat Islam untuk menjalani kehidupan dengan sikap seimbang, adil, dan penuh kasih sayang.

Dalam implementasinya, prinsip moderasi atau jalan tengah dalam Islam mencakup empat bidang diskusi utama. Pertama, moderasi dalam hal akidah mengajarkan umat Islam untuk mengadopsi keyakinan yang seimbang dan tidak ekstrem. Kedua, moderasi dalam hal ibadah menekankan keseimbangan dan proporsionalitas dalam pelaksanaan ritual keagamaan. Ketiga, moderasi dalam hal perilaku dan karakter mengajarkan pentingnya menjaga sikap dan moral yang seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, moderasi dalam hal tasyri' atau pembentukan syariat menekankan penafsiran yang moderat dan kontekstual terhadap hukum-hukum Islam. Dengan pendekatan ini, umat Islam diarahkan untuk menjalani kehidupan dengan sikap moderat yang mencakup seluruh aspek keagamaan dan moralitas.<sup>16</sup>

## 2. Prinsip Dasar Moderasi

Prinsip mendasar dalam moderasi beragama adalah menjaga harmoni di antara berbagai aspek, seperti keseimbangan antara akal dan wahyu, fisik dan spiritual, hak dan kewajiban, kepentingan pribadi dan kebaikan bersama, kewajiban dan kebebasan sukarela, teks agama dan

---

<sup>16</sup> Mohamad Fahri, Ahmad Zainuri. *Moderasi Beragama di Indonesia*. Intizar Vol. 25. No. 2. Desember 2019, hlm. 3-4 <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar>

interpretasi otoritas agama, idealisme dan realitas, serta keseimbangan antara sejarah dan masa depan. Dengan demikian, esensi dari moderasi beragama terletak pada sikap yang adil dan seimbang dalam memahami, menanggapi, dan menerapkan semua konsep yang saling berhubungan di atas.

Prinsip kedua, yakni keseimbangan, menggambarkan sikap, pandangan, dan komitmen untuk selalu memegang teguh nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Bersikap seimbang tidak berarti tidak memiliki pendirian. Mereka yang bersikap seimbang menunjukkan keputusan yang kuat namun fleksibel, karena selalu mendukung keadilan tanpa mengabaikan hak-hak orang lain. Keseimbangan dapat diartikan sebagai pendekatan yang moderat, tidak berlebihan maupun kurang, dan tidak ekstrem dalam konservatif atau liberal.

Menurut Mohammad Hashim Kamali, prinsip keseimbangan dan keadilan dalam konsep moderasi menunjukkan bahwa dalam praktek beragama, seharusnya seseorang tidak mengambil sikap yang ekstrem, melainkan selalu mencari kesepakatan. Kamali menganggap wasathiyah sebagai elemen kunci dalam ajaran Islam, yang seringkali terlupakan oleh umatnya meskipun sebenarnya merupakan esensi dari ajaran tersebut. Moderasi bukanlah konsep eksklusif dari Islam, namun juga diajarkan dalam agama-agama lain.

Lebih jauh, moderasi dianggap sebagai kebijakan yang mendorong terbentuknya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, hingga hubungan antarmanusia secara umum. Kamali menyatakan bahwa kedua nilai, keadilan dan keseimbangan, dapat lebih mudah diwujudkan jika seseorang memperlihatkan tiga karakter utama, yaitu kebijaksanaan, ketulusan, dan keberanian. Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama, yang selalu memilih jalur tengah, akan lebih mudah dicapai ketika seseorang memiliki pengetahuan agama yang memadai untuk bersikap bijak, mampu menahan godaan sehingga dapat bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan pandangan

kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui kebenaran yang mungkin berbeda dari pandangan orang lain dan berani menyampaikan pandangannya yang didasarkan pada pengetahuan.

Moderasi beragama mendorong umat beragama untuk tidak menjauh atau mengisolasi diri, melainkan menjadi inklusif, terbuka, bersatu, beradaptasi, serta berinteraksi dengan berbagai komunitas, sambil terus belajar dan memberikan pengajaran. Dengan pendekatan ini, moderasi beragama akan mendorong setiap umat beragama untuk tidak mengadopsi sikap yang ekstrem dan berlebihan dalam menghadapi keragaman, termasuk keragaman agama dan interpretasi agama. Sebaliknya, mereka diharapkan untuk selalu bersikap adil dan seimbang, memungkinkan kehidupan dalam kerangka kesepahaman bersama.<sup>17</sup>

### 3. Indikator-indikator Moderasi Beragama

Sikap moderat pada dasarnya adalah keadaan yang dinamis, senantiasa berubah dan berkembang, karena moderasi merupakan suatu proses yang terus-menerus dalam interaksi masyarakat. Moderasi dan sikap moderat dalam konteks beragama selalu berhadapan dengan nilai-nilai yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap moderasi beragama harus dapat mencerminkan bagaimana konflik dan dinamika nilai-nilai tersebut terjadi. Indikator moderasi beragama yang akan digunakan terdiri dari empat aspek, yakni:

#### a) Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan memainkan peran krusial sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi pengaruh pandangan, sikap, dan praktik agama seseorang terhadap kesetiiaannya terhadap prinsip-prinsip dasar kebangsaan. Fokus utamanya terletak pada penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikap terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, dan tingkat nasionalisme individu. Seiring dengan

---

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *MODERASI BERAGAMA*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). Cet. 1, hlm. 18-23

itu, komitmen kebangsaan juga mencakup penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 beserta regulasinya.

Pentingnya komitmen kebangsaan ini tidak hanya terletak pada aspek kesetiaan terhadap nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga menjadi indikator penting dalam konteks moderasi beragama. Menurut Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, dalam perspektif moderasi beragama, praktik agama sejalan dengan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Sebaliknya, kewajiban sebagai warga negara juga dianggap sebagai implementasi nyata dari ajaran agama. Oleh karena itu, komitmen kebangsaan bukan hanya mencerminkan kesetiaan terhadap negara, tetapi juga menjadi pijakan bagi moderasi beragama, mengaitkan erat prinsip-prinsip kebangsaan dengan praktik keagamaan yang seimbang dan harmonis.

b) Toleransi

Toleransi merupakan sikap yang memberikan ruang dan menghormati hak orang lain untuk memiliki keyakinan, mengungkapkan keyakinannya, serta menyampaikan pendapat, bahkan jika itu bertentangan dengan pandangan kita sendiri. Dalam konteks ini, toleransi mencerminkan sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima keberagaman. Kesadaran akan toleransi selalu diiringi oleh sikap hormat, mengakui keberagaman sebagai bagian integral dari diri kita, dan mengadopsi pola pikir positif.

Sebagai suatu sikap dalam menghadapi perbedaan, toleransi menjadi landasan utama dalam sistem demokrasi. Demokrasi dapat berfungsi optimal hanya ketika individu mampu menahan pendapatnya dan kemudian menerima pandangan orang lain. Oleh karena itu, tingkat kematangan demokrasi suatu bangsa dapat diukur, antara lain, melalui sejauh mana tingkat toleransinya. Semakin tinggi toleransi terhadap perbedaan, semakin demokratis pula suatu bangsa, dan sebaliknya. Pentingnya toleransi tidak terbatas pada keyakinan agama

saja, melainkan juga melibatkan aspek-aspek seperti perbedaan ras, jenis kelamin, orientasi seksual, suku, budaya, dan lain sebagainya.

c) Anti Kekerasan

Anti-kekerasan dalam konteks moderasi beragama menunjukkan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama keyakinan agama atau dalam upaya mempromosikan suatu ideologi. Pada dasarnya, sikap anti-kekerasan ini mendasarkan pada pemahaman bahwa moderasi beragama mencakup penolakan terhadap segala bentuk tindakan kekerasan sebagai sarana untuk menyebarkan atau mempertahankan keyakinan agama tertentu. Dalam konteks ini, moderasi beragama mengajarkan bahwa perbedaan keyakinan harus dihadapi dengan dialog, penghormatan, dan saling pengertian, bukan melalui konfrontasi fisik atau penggunaan kekerasan.

Anti-kekerasan dalam moderasi beragama juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya membangun masyarakat yang damai dan inklusif. Sikap ini menekankan bahwa moderasi dalam menjalankan ajaran agama tidak hanya berkaitan dengan aspek keyakinan, tetapi juga melibatkan tindakan positif untuk menciptakan harmoni sosial. Dengan menolak kekerasan, individu yang menganut moderasi beragama berkontribusi dalam membangun lingkungan yang menghargai keberagaman, mendukung kerjasama antaragama, dan membentuk landasan yang kokoh untuk toleransi dan saling penghormatan di dalam masyarakat.

d) Akomodasi Terhadap Budaya Lokal

Kemampuan untuk berakomodasi terhadap kebudayaan lokal merupakan kemampuan individu atau kelompok untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai, norma-norma, dan praktik budaya yang ada dalam suatu lingkungan atau masyarakat tertentu. Hal ini mencakup kemampuan untuk memahami, menghormati, dan mengintegrasikan diri dengan kebudayaan lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip

dasar atau identitas pribadi. Berakomodasi terhadap kebudayaan lokal mencerminkan kesediaan untuk belajar dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar, serta mengadopsi elemen-elemen budaya setempat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks moderasi beragama, kemampuan untuk berakomodasi terhadap kebudayaan lokal menjadi prinsip penting yang menggarisbawahi keharmonisan antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya setempat. Moderasi beragama tidak hanya melibatkan penyesuaian terhadap ajaran agama, tetapi juga membutuhkan kemampuan untuk merangkul dan menghargai keberagaman budaya yang ada dalam masyarakat. Ini mencakup pemahaman mendalam terhadap tradisi, norma-norma, dan adat istiadat lokal, serta sikap terbuka untuk berinteraksi dan berbagi dengan komunitas setempat.

Kemampuan berakomodasi terhadap kebudayaan lokal dalam konteks moderasi beragama dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan ruang dialog antara agama dan budaya. Ini melibatkan kesediaan untuk memahami dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai agama. Dengan demikian, individu yang mempraktikkan moderasi beragama tidak hanya menjadi anggota masyarakat yang beragam secara keberagaman agama, tetapi juga terlibat aktif dalam memperkokoh keharmonisan sosial melalui integrasi nilai-nilai agama dengan kebudayaan lokal. Kemampuan ini memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang inklusif, mengurangi konflik, dan mendorong pengembangan nilai-nilai bersama yang menggabungkan kearifan lokal dengan nilai-nilai agama yang moderat.<sup>18</sup>

Keempat parameter ini dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana seseorang menerapkan moderasi beragama di Indonesia

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *MODERASI BERAGAMA*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). Cet. 1, hlm. 38-43

dan sejauh mana ia rentan terhadap pengaruh ekstrem. Identifikasi kerentanan tersebut penting agar langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk memperkuat moderasi beragama.

### **C. Konsep Dasar Masyarakat**

#### **1. Pengertian Masyarakat**

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan. Masyarakat terbentuk melalui hubungan, kebiasaan, tata cara, wewenang, kerja sama, dan kesamaan budaya, wilayah, serta identitas. Masyarakat juga memiliki adat istiadat, tradisi, sikap, dan persatuan yang mengikat mereka. Masyarakat juga dapat dipandang sebagai suatu system kemasyarakatan yang terbentuk melalui hubungan anggota-anggotanya. Secara umum, masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama, berinteraksi sosial, mengalami perubahan sosial, dan memiliki kebersamaan. Masyarakat juga dapat di definisikan sebagai sekumpulan individu yang hidup bersama untuk memperoleh kepentingan bersama dan juga memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat dapat dibatasi oleh lingkungan, bangsa, golongan, territorial dan sebagainya.<sup>19</sup>

Masyarakat merupakan bagian integral dari kehidupan manusia sejak zaman prasejarah hingga era modern saat ini. Ini adalah jringan kompleks individu-individu yang tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu dan berinteraksi dalam berbagai cara. Pada dasarnya masyarakat merupakan sebuah entitas sosial yang terdiri dari individu-individu yang berbagi ruang geografis, norma, nilai dan budaya. Ini adalah tempat dimana manusia membangun hubungan, saling memengaruhi dan

---

<sup>19</sup> Donny Prasetyo, Irwansyah, “Memahami Masyarakat dan Perspektifnya”, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan Sosial, Vol. 1, Issue 1, Januari 2020, E-ISSN: 2716-375X, P-ISSN: 2716-3768. <https://dinastirev.org/JMPIS>, hlm. 1-4

membentuk identitas kolektif. Masyarakat bisa berupa desa kecil, kota besar atau negara-negara yang kompleks.

Masyarakat memiliki struktur yang mencakup berbagai kelompok sosial dan institusi, seperti keluarga, sekolah, agama, pemerintah dan yang lainnya. Ini adalah bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan memengaruhi cara kita berperilaku dan berinteraksi. Dstruktur ini juga memainkan peran dalam mempertahankan ketertiban sosial. Masyarakat memiliki beberapa peran dalam kehidupan manusia, yaitu:

a. Integrasi Sosial

Integrasi Sosial adalah peran masyarakat dalam menyatukan individu dengan beragam latar belakang menjadi satu kesatuan yang lebih besar. Dimana ini menciptakan rasa solidaritas dan juga menciptakan identitas bersama.

b. Regulasi Sosial

Masyarakat memiliki peran dalam mengatur perilaku individu melalui norma dan hukum. Ini membantu dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan juga keamanan dalam komunitas yang ada di masyarakat tersebut.

c. Pemberian identitas

Masyarakat berperan memberikan identitas kepada individu. Dimana orang akan mendefinisikan diri mereka sebagai bagian dari masyarakat tertentu dengan budaya dan nilai-nilai yang terkait.

d. Pemberian dukungan sosial

Masyarakat adalah sumber dukungan emosional dan materi kepada individu-individu. Peran tersebut memberikan suport baik berupa emosional maupun juga finansial kepada mereka yang dalam keadaan sulit.

e. Pembentukan nilai budaya dan partisipasi politik

Peran masyarakat menciptakan norma, nilai, budaya yang membentuk sebuah pandangan dunia individu serta memungkinkannya



partisipasi politik para warganya dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi sebuah kebijakan dan aturan yang berlaku.

Masyarakat tidaklah statis, melainkan berubah seiring berjalannya waktu. Perubahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti teknologi, globalisasi, dan sejarah. Masyarakat yang beradaptasi dengan perubahan, akan lebih cenderung berkembang lebih baik. Sementara yang tidak beradaptasi akan sebaliknya, yakni mengalami ketidaksetabilan dan tidak adanya perubahan kearah yang lebih baik. Masyarakat adalah jaringan yang sangat kompleks yang membentuk dasar-dasar kehidupan sosial manusia. Memahami peran, struktur, dan perubahan dalam masyarakat penting dalam menjalani kehidupan kita serta membangun masa depan yang lebih baik.

## 2. Klasifikasi Masyarakat

Klasifikasi masyarakat adalah upaya untuk memahami variasi dan perbedaan dalam cara manusia mengorganisir diri dan berinteraksi dalam konteks sosial. Klasifikasi masyarakat membantu kita memahami kompleksitas kehidupan manusia dalam berbagai konteks. Manusia hidup dalam berbagai jenis masyarakat yang dapat diklasifikasikan, klasifikasi masyarakat yang dimaksud yaitu:

### a. Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional adalah yang paling dekat dengan cara hidup manusia pada masa prasejarah. Mereka sering kali berbasis pada cara hidup dengan bertani, berburu, dan pengumpulan sebagai sumber kehidupan utama. Keluarga, suku, norma-norma budaya memainkan peran utama dalam masyarakat ini. Ada kelebihan dan kekurangan daripada masyarakat tradisional. Salah satu kelebihan dan kekurangannya ialah tradisi-tradisi masih dijaga dengan kuat dan kekurangannya sendiri ialah perubahan yang terjadi dirasa lambat sebagai ciri khasnya.

b. Masyarakat Modern

Seiring perkembangan teknologi dan industrialisasi, masyarakat modern berkembang dengan pesat. Dimana mereka cenderung berfokus pada tatanan ekonomi pasar, pemerintahan sentral, dan juga mobilitas sosial. Masyarakat modern lebih kompleks dalam strukturnya, seringkali perubahan terjadi lebih cepat ketimbang dengan masyarakat tradisional.

c. Masyarakat Multikultural

Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari beragam kelompok etnis, budaya, dan agama. Ini menciptakan lingkungan dimana berbagai ragam tradisi dan nilai bersatu. Meski dapat menciptakan konflik, masyarakat multikultural juga menghadirkan peluang untuk pertukaran nilai, budaya dan juga keragaman yang kaya.

d. Masyarakat Majemuk

Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang memiliki berbagai tingkatan atau lapisan sosial, seperti kelas sosial ataupun hierarki etnis. Ini menciptakan kesenjangan sosial dan juga ekonomi yang dapat mempengaruhi kesetaraan dalam akses sumber daya dan juga peluang.

e. Masyarakat Digital

Dalam era kemajuan teknologi digital, masyarakat digital semakin penting dan masuk sebagai klasifikasi masyarakat. Ini adalah masyarakat yang terhubung secara digital (online) melalui media sosial, platform, e-commerce, dan komunikasi digital yang lain. Dimana ini mengubah bagaimana cara kita berinteraksi, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

#### **D. Konsep Dasar Harmonisasi**

1. Pengertian Harmonisasi

Harmonisasi adalah konsep yang telah menjadi sorotan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Ini mencerminkan upaya pencarian keselarasan dan kerja sama antara berbagai elemen yang mempengaruhi

kehidupan kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harmonisasi adalah usaha mencari keselarasan. Keselarasan ini merujuk pada kenyataan bahwa manusia sebagai makhluk sosial diharapkan hidup damai, berdampingan, dan meminimalisir konflik serta perpecahan dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>20</sup> Harmonisasi dapat juga dijelaskan sebagai sebuah keteraturan sosial yang mencerminkan system kemasyarakatan, pola hubungan, dan kebiasaan yang berjalan dengan lancar untuk mencapai suatu tujuan. Sementara itu, keteraturan sosial adalah kondisi dimana hubungan-hubungan sosial berjalan seiring, selaras, dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku.<sup>21</sup>

Istilah harmonisasi berakar dari kata harmoni, dalam bahasa yunani disebut dengan istilah harmonia yang merujuk pada hubungan serasi dan sesuai. Dari perspektif filsafat, harmoni diartikan sebagai sebuah kolaborasi antara berbagai faktor sedemikian rupa sehingga mereka menghasilkan kesatuan yang mulia. Seperti halnya harmoni dalam bagian-bagian tubuh manusia yang diperlukan satu sama lain untuk dianggap sebagai suatu individu. Disisi lain, istilah harmoni juga digunakan sebagai sebuah pola, contohnya dalam bidang sosiologi yang mewakili upaya untuk mengatasi pertentangan dalam masyarakat dengan menerapkan hubungan sosial ekonomi yang lebih baik melalui dialog antar anggota masyarakat yang juga disebut sebagai pola integrasi.<sup>22</sup>

Kusnu Goesniadhie memberikan penjelasan kompherensif tentang makna istilah harmonis, yang mencakup keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan, dan juga mengidentifikasi unsur-unsur serta maknanya termasuk yang terdiri dari:

---

<sup>20</sup> Ishomudin, *Sosiologi Agama: Pluralisme Agama dan Interpretasi Sosiologi* (Malang: Pusat Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 1997), hlm. 167

<sup>21</sup> Siti Miftahul Jannah dan Muhammad Nawir, "Harmonisasi Agama (Studi Kasus Koeksistensi Umat Beragama di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu)". *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, VI, (Juli, 2018), hlm. 3

<sup>22</sup> Hassan Shaddy, dkk, *Ensiklopedia Indonesia*, Ichtisar Baru-Van Hoeve, Jakarta hlm.

- a. Adanya hal-hal ketegangan yang berlebih.
- b. Menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing agar membentuk system.
- c. Proses atau sebuah upaya untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan.
- d. Kerja sama antar berbagai faktor yang sedemikian rupa, sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Makna harmonisasi sendiri menurut Kusnu Goesniadhie adalah suatu usaha atau proses yang bertujuan mengatasi perbedaan, konflik, dan ketidakcocokan. Tujuannya adalah mencapai keselarasan, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan di antara berbagai faktor. Sehingga faktor-faktor ini membentuk kesatuan yang mulia sebagai bagian dari system. Dengan kata lain, harmonisasi dapat dijelaskan sebagai upaya untuk menyelaraskan atau menyesuaikan sesuatu yang dianggap tidak sesuai atau tidak serasi, sehingga menghasilkan harmoni dalam berbagai aspek.

Dari penjelasan diatas, harmonisasi merupakan sebuah konsep penting yang memainkan peran besar dalam penciptaan masyarakat damai, berdampingan dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan upaya untuk mencapai keselarasan, kerjasama, dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis, inklusif dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian merupakan salah satu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis data.<sup>23</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam penelitian adalah:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian dengan judul “Implementasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Membangun Masyarakat Harmonis di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas” merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia melalui pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif, interpretatif, dan kontekstual. Penelitian ini menekankan pada pemahaman mendalam tentang makna, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok dalam konteks sosial yang lebih luas. Penelitian kualitatif juga dapat digambarkan untuk memberikan teori, praktis, kebijakan, problem sosial, dan tindakan-tindakan lainnya.<sup>24</sup> Menurut Afrizal, penelitian kualitatif adalah sebuah metode yang biasanya digunakan dalam disiplin ilmu sosial dengan mengumpulkan serta menganalisis data dalam bentuk kata-kata berupa lisan, tulisan, dan juga tingkah laku manusia. Peneliti tidak melakukan kegiatan yang berupa penghitungan atau mengkuantifikasikan data yang diperoleh, serta tidak melakukan analisis berdasarkan hitungan angka-angka. Sehingga hasil analisis data dalam sebuah penelitian kualitatif merupakan kata dan perbuatan manusia.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Siyoto dan Sodik. *Dasar Metode Penelitian*. (Literasi Media Publishing, 2015).

<sup>24</sup> M. Djundi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 25

<sup>25</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali Pers, Ed. 1, 2, 2015), hlm.

Penelitian yang berjudul Implementasi Nilai Moderasi Beragama dalam Membangun Masyarakat Harmonis di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas ini menggunakan metode kualitatif untuk pengumpulan data dan juga analisisnya. Dalam penelitian, tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan data serta menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif untuk menjawab rumusan masalah, Bagaimana implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam membangun masyarakat harmonis di kecamatan Purwokerto Timur.

Dalam menjawab rumusan masalah, peneliti menggunakan hasil dari analisis data kualitatif. Hal ini dikarenakan penyajian data yang dilakukan secara langsung, serta hubungan peneliti dengan para responden yang dapat menyesuaikan diri dengan fakta Implementasi Nilai Moderasi Beragama dalam Membangun Masyarakat Harmonis di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif adalah disebabkan adanya beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut antara lain penelitian ini bersifat menggambarkan dan menguraikan suatu hal sesuai dengan fakta, artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, penalaran, gambar dan bukan dalam bentuk angka. Hal ini disebabkan karena adanya penerapan mengenai penyajian data kualitatif yang dilakukan dengan cara langsung hubungan peneliti dengan responden akan lebih mengena dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan yang sedang diteliti.

## **B. Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Sasarannya yaitu pemerintah kecamatan dalam membuat sebuah program kegiatan untuk mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama yang akan akan dilaksanakan oleh masyarakat Purwokerto Timur.

## **C. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2023. Penulis berharap dapat selesai dalam waktu yang cepat tidak lebih dari satu bulan.

Akan tetapi, apabila masih ada data yang belum terpenuhi maka akan terus melakukan penelitian hingga data terkumpul dengan lengkap.

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau entitas yang menjadi focus dari sebuah penelitian. Mereka adalah subjek yang akan diamati, diukur, dan juga dianalisis dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, adalah Pemerintah Kecamatan Purwokerto Timur. Dengan mempelajari bagaimana Pemerintah Kecamatan Purwokerto Timur menerapkan dan melaksanakan perannya sehingga kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana nilai moderasi dapat diterapkan.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi fokus pada sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek adalah tentang implementasi nilai moderasi beragama, karena hal inilah yang menjadi fokus penelitian. Dimana penelitian ini akan mengkaji bagaimana nilai moderasi beragama dapat diterapkan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Purwokerto Timur.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua macam data, yakni data primer dan sekunder. Berikut penjelasan tentang data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

##### **a. Data Primer**

Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah Pemerintah Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

##### **b. Data Sekunder**

Adapun sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi Kecamatan Purwokerto Timur antara lain profil Purwokerto Timur, data statistik masyarakat Purwokerto Timur, buku tentang moderasi beragama di Indonesia, jurnal moderasi beragama.

Sumber data adalah sumber darimana data penelitian diperoleh. Adapun sumber data penelitian ini adalah:

- a. *Person*, adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari jawaban lisan dengan proses wawancara. Person dalam penelitian ini diantaranya ialah,
- b. *Place*, adalah sumber data yang sifatnya diam atau tidak bergerak, dan dapat diperoleh informasi melalui observasi. Dalam hal ini berupalokasi dan benda-benda yang terkait dengan penelitian.
- c. *Data Tertulis*, adalah sumber data yang berwujud huruf, angka, gambar, symbol dan juga yang lainnya. Data ini digunakan sebagai sumber untuk mendapatkan data yang berupa dokumentasi.<sup>26</sup>

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Peneliti menggunakan teknik ini untuk menarik kesimpulan yang dimulai dari sebuah pernyataan ataupun fakta khusus kepada sebuah kesimpulan yang bersifat umum.<sup>27</sup>

##### **1. Observasi Non-Partisipan**

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian. Posisi peneliti dalam penelitian adalah meneliti observasi non partisipan. Artinya peneliti hadir pada tempat atau lokasi yang diamati. Kegiatan observasi penulis lakukan agar dapat mengamati secara langsung kondisi masyarakat Purwokerto Timur, yakni melihat lokasi penelitian, memperhatikan perilaku para informan, mendengarkan pendapat para informan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan dampak moderasi beragama.

Tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan observasi adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Re,aja Rosda Karta, 2000), hlm. 3

<sup>27</sup> Nana Sujana, *Menyusun Karya Tulisan Ilmiah, untuk Memperoleh Angka Kredit*, (Bandung: Sinar Baru,1992), hlm. 8



- a. Observasi Deskriptif, peneliti melakukan observasi dalam kondisi sosial tertentu sebagai objek penelitian. Dalam tahapan ini, peneliti akan melakukan eksplorasi dan penjajakan secara menyeluruh, mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Seluruh data yang ditemukan dicatat, dan hasil dari observasi tersebut akan dibuat kesimpulan awal yang belum tersusun.
- b. Observasi Terfokus, adalah observasi yang dilakukan untuk memfokuskan perhatian pada aspek tertentu dari suatu objek penelitian. Dalam tahap ini, peneliti sudah melakukan observasi kecil, suatu kegiatan observasi yang memfokuskan pada suatu aspek tertentu.
- c. Observasi Terseleksi, pada tahap ini peneliti fokus pada data yang sudah ditemukan, sehingga data diuraikan lebih rinci. Pada tahap ini, peneliti mendapatkan suatu temuan data berdasarkan karakteristik, perbedaan, dan persamaan antar kategori, dan menemukan korelasi satu kategori dengan kategori lainnya.<sup>28</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dan responden. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber, baik berupa fakta, pendapat, maupun pengalaman. Menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.<sup>29</sup>

Menurut sugiyono, wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung atau melalui media lain untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan

---

<sup>28</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 232

<sup>29</sup> Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 187

tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.<sup>30</sup> Peneliti menggunakan metode wawancara untuk mencari informasi model moderasi beragama dalam implementasi nilai moderasi beragama dalam membangun masyarakat yang harmonis di Purwokerto Timur.

Wawancara dilakukan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat umum. Penulis menggunakan narasumber tokoh agama dan juga tokoh masyarakat untuk mengetahui respon masyarakat umum tentang implementasi nilai moderasi beragama dalam membangun masyarakat yang harmonis di Purwokerto Timur.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.<sup>31</sup> Menurut Arikunto dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang tidak langsung melalui orang, melainkan melalui dokumen-dokumen tertulis, gambar, atau foto.<sup>32</sup>

Teknik dokumentasi ini peneliti gunakan mengingat sangat penting dalam menunjang serta untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Berikut beberapa cara dalam melakukan metode dokumentasi yang peneliti lakukan:

- a. Membuat pedoman dokumentasi dengan menggunakan garis besar atau kategori data yang dibutuhkan.

---

<sup>30</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 232

<sup>31</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan..* hlm,232

<sup>32</sup> Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 136

- b. Membuat checklist atau daftar variable dari data yang akan dikumpulkan. Dengan checklist peneliti dengan mudah memberi tanda pada data yang ditemukan dari penelitian.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dibutuhkan adalah profil dan data kependudukan Kecamatan Purwokerto Timur, transkrip wawancara, pedoman wawancara, artikel, jurnal dan buku-buku tentang moderasi beragama dari berbagai sumber. Data yang dihasilkan tersebut diharapkan menjadi data penting untuk menjawab bagaimana implementasi nilai moderasi beragama dalam membangun masyarakat yang harmonis di kecamatan purwokerto timur.

#### **G. Teknik Pengujian dan Keabsahan Data**

Data penelitian yang telah dikumpulkan dicatat dengan sebaik-baiknya. Data yang berkaitan dengan Implementasi Nilai Moderasi Beragama dalam Membangun Masyarakat Harmonis di Purwokerto Timur. Peneliti melakukan pengecekan keabsahan dan menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan merupakan salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Perpanjangan pengamatan dapat membantu peneliti untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kredibel. menurut Moleong, perpanjangan pengamatan adalah penambahan waktu yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Perpanjangan pengamatan dapat dilakukan dengan cara memperpanjang waktu penelitian di lapangan, melakukan pengamatan ulang terhadap objek penelitian, atau melakukan wawancara ulang dengan informan, dan mengumpulkan data tambahan dari sumber lain.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 182

<sup>34</sup> Moleong, L. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), hlm. 333

Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam, untuk menguji kembali hipotesis atau teori yang telah dirumuskan, dan untuk mengamati perubahan yang terjadi dalam objek penelitian. Selain itu, perpanjangan pengamatan memiliki manfaat diantaranya meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, meningkatkan ketepatan hasil penelitian, dan meningkatkan kedalaman hasil penelitian.<sup>35</sup>

## 2. Meningkatkan Ketekunan

Dalam penelitian kualitatif, ketekunan merupakan salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data.<sup>36</sup> Ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.<sup>37</sup>

Meningkatkan ketekunan dalam penelitian berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, sehingga data yang terkumpul menjadi lebih lengkap dan mendalam. hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan melakukan pengamatan berulang, memperluas cakupan pengamatan, dan melakukan triangulasi.<sup>38</sup> Meningkatkan ketekunan dalam penelitian merupakan salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yang penting dalam penelitian kualitatif. Tentu hal ini dapat membantu peneliti untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kredibel.

## 3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang penting dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat membantu peneliti untuk

---

<sup>35</sup> Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 302

<sup>36</sup> Moleong, L. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 322

<sup>37</sup> Moleong, L. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif..*, hlm. 150

<sup>38</sup> Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 349

memperoleh data yang lebih kredibel dan akurat. Ada beberapa triangulasi dalam penelitian, yaitu:

- a. Triangulasi Sumber, teknik ini digunakan untuk menguji terhadap kredibilitas data dengan cara mengecek data dari beberapa sumber. Peneliti akan melakukan wawancara dengan sumber dari data yang berupa tokoh masyarakat, kemudian melakukan wawancara kepada masyarakat untuk mengecek apakah data yang diberikan ada kesesuaian.
- b. Triangulasi Metode, teknik ini dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama, akan tetapi dengan teknik yang berbeda. Seperti data wawancara yang didapat dari tokoh masyarakat kemudian dicek melalui data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi.
- c. Triangulasi Teori, kondisi waktu yang tidak tepat dapat mempengaruhi terhadap kredibilitas data yang diperoleh. Seperti data teknik sebuah wawancara dilakukan pada saat narasumber masih fit dan belum banyak masalah. Biasanya hal ini akan lebih mudah dalam memberikan data yang lebih valid dan kredibel. Sehingga dalam pengujian terhadap kredibilitas data dapat dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda dari sebelumnya. Jika data yang dihasilkan selalu berbeda, maka perlu dilakukan dengan cara berulang hingga ditemukan validitas data yang dibutuhkan.<sup>39</sup>

## **H. Analisis Data**

Analisis data pada penelitian skripsi ini menggunakan analisis deskriptif. Peneliti berupaya ingin menguraikan kembali data-data dari hasil penelitian yang telah terkumpul tentang Implementasi Nilai Moderasi Beragama dalam Membangun Masyarakat Harmonis di Purwokerto Timur. Analisis data merupakan proses yang penting dalam penelitian, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Analisis data merupakan proses penyusunan data

---

<sup>39</sup> Sugiono, *Metode Penelitian...*, hlm.371

yang diperoleh secara sistematis dari hasil wawancara, catatan observasi, dan temuan lain sehingga dapat ditemukan menjadi mudah dipahami dan dapat dipublikasikan kepada orang lain. langkah analisis data dilakukan dengan mengelompokan data, menjabarkan kedalam satuan-satuan tertentu, melakukan sintesa, menyusun dalam sebuah pola, membuat prioritas data penting dan yang akan dianalisis untuk membuat kesimpulan.

Analisis data yang baik dapat membantu peneliti untuk menemukan makna dan pola dalam data yang dikumpulkan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan bermanfaat. Secara umum, analisis data dapat dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu:

1. Reduksi data,

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah dengan cara meringkas, membuang hal-hal yang tidak penting, mengorganisasikan data, dan mencari pola. Data yang sudah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat memudahkan bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data kembali. Dalam kegiatan reduksi data tersebut, peneliti harus mengacu terhadap tujuan penelitian yang akan dicapai.

Dalam penelitian kualitatif, memiliki tujuan utama yang berupa temuan dalam penelitian itu sendiri. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan saat peneliti mendapatkan data dari Kecamatan Purwokerto Timur kaitannya dengan Implementasi Nilai Moderasi Beragama. Selanjutnya, penulis merangkum data yang sudah diperoleh dengan mengambil data-data yang berkaitan seputar pembahasan pada penelitian ini. Sehingga data-data tersebut diarahkan untuk mengambil kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Sajian data

Sajian data yaitu proses menyajikan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami seperti tabel, grafik, maupun diagram. Dalam penyajian data, peneliti menguraikan data-data tentang bagaimana Implementasi Nilai Moderasi Beragama pada Masyarakat Purwokerto

Timur itu diterapkan dan disosialisasikan. Sehingga makna dari data yang ditemukan lebih mudah untuk dipahami.

### 3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah sebuah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diuraikan dengan kalimat singkat padat dan mudah dipahami, serta dengan menyampaikan berulang kali melakukan peninjauan tentang kebenaran dari kesimpulan yang diambil khususnya yang berkaitan dengan relevansi terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah mengenai Implementasi Nilai Moderasi Beragama dalam Membangun Masyarakat Harmonis di Purwokerto Timur.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Dalam Bab IV ini, peneliti akan memaparkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil yang diperoleh oleh peneliti adalah sebagai berikut:

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

Purwokerto Timur adalah kecamatan yang terletak di bagian timur kota Purwokerto. Purwokerto Timur memiliki luas wilayah 841,93 Ha, yang mencakup sekitar 0.63% dari total luas Kabupaten Banyumas. Sebagai pusat administratif Kabupaten Banyumas, Purwokerto Timur juga menjadi jantung kota Purwokerto dengan berbagai kegiatan publik. Hampir semua aspek kehidupan dapat ditemukan di Purwokerto Timur, mulai dari pusat pemerintahan dan perkantoran, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, hingga pusat perdagangan jasa, serta berbagai ruang publik yang terletak di kecamatan ini.

Kecamatan Purwokerto Timur terdiri dari 6 kelurahan yaitu Kelurahan Sokanegara, kelurahan Kranji, kelurahan Purwokerto Lor, Kelurahan Purwokerto Wetan, Kelurahan Mersi, dan Kelurahan Arcawinangun. Ada total 25 Rukun Warga (RW) dan 500 Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Purwokerto Timur. Kecamatan Purwokerto Timur memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Purwokerto Utara
- Sebelah Selatan : Kecamatan Purwokerto Selatan
- Sebelah Timur : Kecamatan Kembaran
- Sebelah Barat : Kecamatan Purwokerto Barat

Secara geografis, kecamatan Purwokerto Timur termasuk kategori daerah dataran tinggi karena letaknya persis berada di kaki gunung slamet. Letak kecamatan Purwokerto Timur dari pusat kota hanya 4 menit dengan akses jalan serta alat transportasi umum yang sudah memadai dan mudah diakses. Sejak tahun 2010 hingga 2020, pola pemukiman setiap desa di Kecamatan Purwokerto Timur mengalami perkembangan. Perubahan terjadi



pada empat desa termasuk desa Kranji dan desa Purwokerto Wetan yang awalnya memiliki pola pemukiman menyebar menjadi seragam. Serta desa Mersi dan Arcawinangun yang awalnya memiliki pola mengelompok menjadi menyebar. Hal tersebut didasarkan pada faktor-faktor seperti sarana prasarana dan tingkat kepadatan penduduk memainkan peran dominan dalam perubahan pola pemukiman tersebut. faktor lain adalah banyaknya pendatang yang menetap di Purwokerto Timur baik untuk bekerja maupun untuk melanjutkan jenjang pendidikan.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, jumlah penduduk di kecamatan Purwokerto Timur pada Desember 2021 sebanyak 56.861 jiwa. Untuk sarana pendidikan, Purwokerto Timur memiliki jumlah Tk 28 unit, SD 31 unit, MI 2 unit, SMP 11 unit, MTs 2 unit, SMA 9 unit, SMK 9 unit MA 3 unit, dan Perguruan Tinggi 3 unit, Pemeluk keagamaan di kecamatan Purwokerto Timur sebagian besar beragama islam, namun pemeluk agama lain juga ada di kecamatan tersebut, mulai dari Kristen, Hindu, Budha, Katholik, Konghucu, dan juga Penghayat. Untuk jumlah tempat peribadatan, di Kecamatan Purwokerto Timur terdapat 72 Masjid, 97 Mushola, 11 Gereja Protestan, 2 Gereja Katholik, 1 Wihara, dan 1 Klenteng.<sup>40</sup>

Adapun keterangan mengenai penduduk Purwokerto Timur terbagi menjadi beberapa tabel sebagai berikut:<sup>41</sup>

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk (Laki-laki dan Perempuan)**

<b>Laki-laki</b>	<b>26.909</b>
<b>Perempuan</b>	<b>29.952</b>
<b>Jumlah</b>	<b>56.861</b>

---

<sup>40</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas Tahun 2022. Diakses melalui <https://banyumaskab.bps.go.id> pada hari Minggu, 24 September 2023 pukul 22:54

<sup>41</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas Tahun 2022. Diakses Melalui <https://banyumaskab.bps.go.id>

**Tabel 4.3**  
**Agama Penduduk**

<b>Kristen</b>	<b>3.915</b>
<b>Katholik</b>	<b>3.224</b>
<b>Hindu</b>	<b>108</b>
<b>Budha</b>	<b>476</b>
<b>Islam</b>	<b>48.624</b>
<b>Jumlah</b>	<b>55.785</b>

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Moderasi Beragama di Purwokerto Timur**

Moderasi beragama adalah suatu sikap atau perilaku yang selalu menempatkan diri di tengah-tengah, bertindak adil, dan seimbang. Indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana seseorang memiliki sikap moderat adalah sebagai berikut:

#### **a. Komitmen kebangsaan**

Komitmen terhadap persatuan bangsa harus dianggap sebagai produk dan fondasi moderasi beragama di Indonesia. Komitmen nasional ini tidak hanya berperan sebagai dasar, melainkan juga sebagai kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan. Jika tekad kebangsaan kuat, maka hal tersebut mampu meredam kontroversi ideologi. Sebaliknya, bila semangat kebangsaan tersebut lemah, berbagai ancaman dapat dengan mudah menggoyahkan ideologi tersebut.

Menjaga ideologi negara merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara dan pemangku kepentingan negara. Salah satu bentuk upaya itu adalah kepala camat mengajak semua pegawai pemerintahan berpartisipasi secara aktif dalam upacara bendera bersama. Di mana pegawai pemerintah Purwokerto Timur didorong untuk ikut serta dalam upacara bersama setiap hari senin dan upacara hari-hari besar nasional lainnya dalam lingkungan

pemerintahan. Langkah ini diambil untuk memperkuat rasa kebangsaan dan kesatuan di kalangan pegawai pemerintahan Purwokerto Timur.

b. Toleransi

Pelaksanaan peneguhan toleransi dapat diartikan sebagai kesiapan mental individu atau kelompok untuk hidup berdampingan dengan mereka yang memiliki perbedaan, seperti perbedaan suku, ras, budaya, atau agama. Toleransi mencakup sikap memberikan ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk mempercayai dan menyatakan keyakinannya, bahkan jika berbeda dengan keyakinan kita sendiri. Oleh karena itu, toleransi harus diiringi dengan keterbukaan untuk berdialog, saling belajar, dan memahami, sehingga terbentuk kohesifitas sosial di antara kelompok-kelompok yang beragam.

Salah satu upaya implementasi toleransi yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan kolaborasi dengan para umat beragama ikut menjaga, mengawal dan memastikan perayaan hari raya seperti sholat id dan natal bersama berjalan lancar dan aman. Dimana kerjasama dilakukan untuk menciptakan suasana harmonis dan menghormati kegiatan keagamaan masing-masing komunitas.

c. Anti Kekerasan

Implementasi moderasi beragama berikutnya dapat dilihat dari perspektif anti kekerasan atau radikalisme. Implementasi nilai moderasi beragama dalam bentuk anti kekerasan menunjukkan komitmen untuk mewujudkan pemahaman dan praktik keagamaan yang damai serta menghindari tindakan kekerasan berbasis agama. Dalam konteks ini, masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk membangun budaya toleransi, saling pengertian, dan dialog antaragama. Anti kekerasan menjadi nilai yang diperkuat, memastikan bahwa perbedaan keyakinan tidak menjadi alasan untuk tindakan kekerasan. Pendidikan dan advokasi moderasi beragama menjadi kunci dalam mengubah mindset dan perilaku, sehingga setiap individu

meresapi arti pentingnya hidup berdampingan tanpa merugikan pihak lain.

Dengan demikian, implementasi nilai moderasi beragama dalam konteks anti kekerasan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan menghormati hak asasi setiap individu tanpa memandang latar belakang agama. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam anti kekerasan adalah dengan mendirikan forum kewaspadaan dini masyarakat dengan berkolaborasi bersama jajaran kepolisian, satlinmas dan satkamling guna mengidentifikasi, mencegah, dan menanggapi situasi yang memerlukan perhatian bersama. Selain itu, pemerintah juga mengadakan monitoring pertemuan rutin selapanan dengan kelurahan untuk berkordinasi membahas berbagai aspek terkait pelayanan masyarakat dan kondisi keamanan.

d. Akomodatif terhadap budaya local

Beradaptasi dengan budaya lokal menggambarkan sikap penerimaan dan penghargaan terhadap adat istiadat serta tradisi yang berkembang di masyarakat setempat. Pentingnya hal ini terletak pada kesesuaian dengan nilai-nilai ajaran agama. Dengan kata lain, adaptasi tersebut harus dilakukan dengan memastikan tidak adanya konflik dan prinsip-prinsip dasar yang dipegang dalam keyakinan agama. Dengan demikian, beradaptasi secara bijaksana memungkinkan harmoni antara individu dan lingkungannya tanpa mengorbankan nilai-nilai keagamaan yang dianut.

Dalam upaya akomodasi terhadap budaya lokal, pemerintah mengadakan festival kentongan serta mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan pemerintah Kecamatan Purwokerto Timur memakai baju adat banyumas setiap hari kamis dalam rangka melestarikan budaya dan menumbuhkan kebanggaan rasa cinta adat Banyumas.

Setiap indikator diatas sering diterapkan oleh pemerintah Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Pemerintah mampu mengimplementasikan keempat indikator dengan baik. Seperti terlihat dalam hasil observasi di daerah tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Purwokerto Timur memiliki kondisi keagamaan yang beragam, meskipun mereka tinggal dalam ruang lingkup yang sama.

## 2. Peran Pemerintah Dalam Mendorong Implementasi Nilai Moderasi Beragama di Purwokerto Timur

Pemerintah memiliki peran krusial dalam mewujudkan nilai moderasi beragama di Purwokerto Timur. Salah satu tanggung jawab utamanya adalah bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menjaga kerukunan hidup umat beragama. Menurut Kristanto selaku Kepala Camat Purwokerto Timur mengatakan kepada peneliti tentang pentingnya Moderasi Beragama bahwa:

*“Kami mengakui bahwa moderasi beragama sangat penting untuk memastikan kerukunan dan harmoni di tengah masyarakat yang beragam seperti di Purwokerto Timur. Pemerintah memiliki peran strategis dalam memfasilitasi implementasi nilai-nilai moderasi beragama untuk menciptakan lingkungan yang toleran dan damai. Kami juga mengambil langkah proaktif dengan membuat forum kewaspadaan dini masyarakat guna meningkatkan kerja sama dan memelihara keharmonisan diantara warga masyarakat”<sup>42</sup>*

Selain itu, menurut bapak Damar Agung selaku pegawai pemerintahan Purwokerto Timur juga mengatakan kepada peneliti bahwa:

*“Kami selalu melakukan kerja sama dan menggandeng umat agama lainnya untuk menjaga kelancaran sholat id, natal dan perayaan ibadah agama lainnya. Serta kami juga mengadakan pertemuan rutin selapanan dengan kelurahan untuk kordinasi membahas berbagai aspek terkait pelayanan masyarakat, kondisi keamanan daerah. Dalam selapanan ini kami juga melibatkan pihak seperti Babinsa, Babinkantibnas, serta tokoh-tokoh masyarakat.”<sup>43</sup>*

---

<sup>42</sup> Wawancara Kepada I. 1, 13 Desember 2023

<sup>43</sup> Wawancara Kepada I. 2, 14 Desember 2023

Pernyataan tersebut mencerminkan kesadaran pemerintah akan pentingnya moderasi beragama sebagai pijakan utama dalam menjaga kerukunan dan harmoni di masyarakat yang heterogen, khususnya di Purwokerto Timur. Moderasi beragama diartikan sebagai pendekatan yang mengedepankan sikap tengah, penerimaan perbedaan, serta penghormatan terhadap keyakinan agama yang beragam. Pemerintah mengakui bahwa dalam masyarakat yang kaya akan keberagaman agama, moderasi beragama menjadi landasan penting untuk mencegah potensi konflik dan meningkatkan pemahaman antarwarga.

Adapun peran pemerintah dalam mendorong implementasi nilai moderasi beragama diantaranya:

#### 1. Sosialisasi

Dalam dinamika sosial masyarakat, pemerintah memegang peran kunci dalam proses sosialisasi baik structural maupun kultural melalui berbagai strategi dan inisiatif. Pemerintah tidak hanya merumuskan kebijakan yang mencakup nilai-nilai nasional, tetapi juga mendorong media dan komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan positif kepada masyarakat. Dengan merancang program sosialisasi khusus, seperti pelatihan dan seminar, pemerintah Purwokerto Timur berupaya meningkatkan pemahaman nilai-nilai yang diinginkan, sementara juga memfasilitasi dialog dan partisipasi masyarakat melalui forum yang dibuat oleh pemerintah seperti forum kewaspadaan dini.

Lebih dari itu, kepemimpinan pemerintah menjadi contoh bagi masyarakat, mempengaruhi perilaku dan sikap. Dengan fokus pada etika kerja, tanggung jawab sosial, dan penanganan isu-isu sosial, pemerintah bertujuan menciptakan lingkungan inklusif yang membangun masyarakat yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam pembangunan sosial.

#### 2. Pelayanan Publik

Pemerintah memegang peran utama dalam menyediakan pelayanan publik, menjalankan serangkaian fungsi yang melibatkan

pengidentifikasian kebutuhan masyarakat, perencanaan, dan pengembangan program yang relevan. Dengan mengelola sumber daya finansial dan manusial, pemerintah membentuk lembaga dan unit-unit pelaksana untuk menyediakan layanan yang mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Pemerintah Purwokerto Timur selalu menyelenggarakan selapanan rapat koordinasi dengan para pemerintah setempat (kelurahan, Babinsa, Babinkantibnas, serta tokoh masyarakat seperti ketua RT. Rapat selapanan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan upaya pelayanan masyarakat, memastikan kondisi keamanan daerah, dan membangun kerjasama antara aparat keamanan, dan tokoh masyarakat setempat di Purwokerto Timur.

Melalui pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, pemerintah memastikan bahwa layanan yang disediakan memenuhi standar yang ditetapkan, sambil mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menangani krisis dan darurat, serta memastikan distribusi layanan yang adil dan merata untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Dengan menjalankan peran-peran ini, pemerintah berupaya menciptakan masyarakat yang sejahtera dan memastikan akses setara terhadap pelayanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat.

### 3. Penyuluhan

Penyuluhan oleh pemerintah memiliki arti yang penting dalam memberikan informasi, membimbing, dan mendidik masyarakat. Sebagai penyedia informasi resmi, pemerintah menggunakan penyuluhan untuk menyampaikan kebijakan, regulasi, dan program terbaru kepada masyarakat. Dalam peran sebagai pembimbing, pemerintah memberikan arahan mengenai cara mengakses layanan publik, hak dan kewajiban warga, serta cara berpartisipasi dalam proses pemerintahan.

Lebih dari itu, penyuluhan pemerintah menjadi instrumen edukasi yang membantu meningkatkan pemahaman masyarakat

terhadap isu-isu kritis seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Dengan demikian, penyuluhan pemerintah tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang diperlukan kepada masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat keterlibatan dan partisipasi warga dalam pembangunan masyarakat yang lebih baik.

Secara keseluruhan, Pemerintah Purwokerto Timur telah menunjukkan komitmen dan keuletan dalam upaya memberdayakan masyarakat melalui implementasi berbagai bentuk penyuluhan. Dengan memanfaatkan media massa lokal, kampanye publik, dan iklan strategis pemerintah telah berhasil menyampaikan pesan-pesan kunci terkait kebijakan, program, dan nilai-nilai penting kepada warga dengan luas dan mudah diakses.

Melalui kegiatan seperti seminar, workshop, dan pendidikan formal di sekolah-sekolah, mereka juga berhasil menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti situs web resmi dan media sosial, menjadi bukti progresif dalam mendekati diri kepada masyarakat dan memastikan informasi disajikan secara instan. Keseluruhan upaya ini mencerminkan aspirasi pemerintah untuk tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan daerah Purwokerto Timur.

### **C. Analisis Data Penelitian**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, menurut hemat penulis pemerintah Purwokerto Timur telah mengambil langkah-langkah konkret dalam menerapkan nilai moderasi beragama dan berperan aktif dalam dinamika sosial masyarakat. Langkah-langkah dan peran tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan. Teori implementasi kebijakan menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan dukungan dari



berbagai aktor tersebut. Pemerintah Purwokerto Timur telah menunjukkan dukungannya terhadap nilai moderasi beragama dan dinamika sosial masyarakat melalui berbagai inisiatif dan peran. Inisiatif-inisiatif tersebut antara lain:

1. Upacara bendera untuk memperkuat kesatuan dan kebangsaan
2. Kolaborasi dengan umat beragama dalam menjaga perayaan hari raya
3. Pendirian forum kewaspadaan dini dan monitoring keamanan
4. Festival kentongan dan kebijakan penggunaan baju adat setiap hari Kamis

Inisiatif-inisiatif tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Purwokerto Timur memiliki komitmen untuk menciptakan lingkungan yang toleran, harmonis, dan menghargai keberagaman. Inisiatif-inisiatif tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah Purwokerto Timur berupaya untuk melibatkan berbagai aktor, termasuk masyarakat dan umat beragama, dalam implementasi kebijakan.

Peran pemerintah Purwokerto Timur dalam dinamika sosial masyarakat juga sejalan dengan teori implementasi kebijakan. Pemerintah Purwokerto Timur berperan sebagai penggerak utama dalam membentuk kesatuan, mengelola layanan publik, dan memberdayakan masyarakat. Peran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Purwokerto Timur memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya peran pemerintah dalam implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan, penjelasan tentang langkah-langkah dan peran pemerintah Purwokerto Timur dalam menerapkan nilai moderasi beragama dan dinamika sosial masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah Purwokerto Timur telah berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Upaya tersebut telah menunjukkan hasil yang positif, yaitu terciptanya lingkungan yang toleran, harmonis, dan menghargai keberagaman.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah Purwokerto Timur untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan:

1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan.

2. Melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai actor.
3. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif.

Untuk menjaga cahaya langkah-langkah moderasi beragama dan dinamika sosial di Purwokerto Timur tetap bersinar, menurut hemat penulis tentu pemerintah harus terus melakukan perbaikan, evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan bahwa setiap implementasi kebijakan sesuai dengan rencana sebagaimana kompas yang selalu dikalibrasi. Komunikasi dan koordinasi yang erat dengan berbagai pihak diibaratkan sebagai benang kuat yang menyatukan dukungan, memperkuat langkah-langkah pemerintah. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dianggap sebagai teropong pengukur keberhasilan, memastikan bahwa setiap kebijakan mencapai tujuannya dan terus membawa Purwokerto Timur menuju arah yang lebih inklusif, harmonis, dan dinamis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil temuan dari data penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Membangun Masyarakat Harmonis di Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Purwokerto Timur telah mengambil langkah-langkah konkret dalam mengimplementasikan nilai moderasi beragama. Kepala camat mendorong partisipasi aktif pegawai pemerintahan untuk memperkuat kesatuan dan kebangsaan melalui upacara bendera. Kolaborasi dengan umat beragama dalam menjaga perayaan hari raya mencerminkan upaya pemerintah dalam membangun harmoni dan menghormati praktik keagamaan.

Langkah-langkah preventif dalam mencegah kekerasan, seperti mendirikan forum kewaspadaan dini dan melakukan monitoring keamanan, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap ketentraman masyarakat. Sementara itu, festival kantong dan kebijakan penggunaan baju adat setiap hari Kamis menandakan usaha pemerintah dalam melestarikan budaya lokal. Secara keseluruhan, inisiatif-inisiatif ini bersatu untuk membentuk lingkungan yang toleran, harmonis, dan menghargai keberagaman di Purwokerto Timur. Melalui inisiatif sosialisasi, pelayanan publik, dan penyuluhan, pemerintah berperan sebagai penggerak utama dalam membentuk kesatuan, mengelola layanan publik, dan memberdayakan masyarakat. Keseluruhan, peran pemerintah ini mencerminkan tekad untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kultural dan nasional.

#### **B. Saran**

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penyelidikan lebih lanjut dengan topik yang serupa. Selain itu, diharapkan

adanya penelitian lanjutan yang membahas aspek-aspek lebih mendalam dan menyeluruh, sehingga dapat menghasilkan temuan baru yang berkontribusi pada pengetahuan ilmu, terutama dalam konteks komunikasi antarumat beragama.

### **1. Bagi Akademisi**

Bagi kalangan akademisi, termasuk dosen, guru, dan peneliti lainnya, penelitian ini menyajikan suatu perspektif atau sudut pandang yang bernilai mengenai implementasi nilai moderasi beragama.

### **2. Bagi Praktisi**

Penelitian ini dapat digunakan untuk memahami seluruh kekayaan budaya lokal, khususnya yang ada di Purwokerto Timur. Sehingga, penelitian ini bisa menjadi gerbang atau pintu masuk bagi praktisi untuk menerapkan temuan-temuan dari penelitian dalam kehidupan kebudayaan di masyarakat Purwokerto Timur.

### **3. Untuk Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi nilai moderasi beragama dalam membangun masyarakat harmonis dari perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Sehingga, penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi yang berharga dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **C. Penutup**

Segala puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas segala nikmat, karunia, dan berkah-Nya, yang memungkinkan penyelesaian skripsi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam perjalanan penulisan skripsi ini, khususnya kepada pemerintah Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Saya sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan, baik dalam aspek penulisan maupun hal lain yang terkait. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya terima dengan senang hati. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, semoga karya ini dapat memberikan manfaat, terutama

bagi penulis sendiri, secara umum bagi para pembaca, dan menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut. Jazakumullah khoiron katsiron.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, A. Khoirul Anam, Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021.
- Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajawali Pers, Ed. 1, 2, 2015.
- Agus Akhmadi, Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia. Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 13, No. 2, Februari-Maret 2019.
- Ahmad Zubaidi dkk. Imajinasi dan Refleksi Kritis Pengembangan Pendidikan Islam. Trenggalek: CV INDONESIA IMAJI, 2022. Cet. Ke-1
- Aliansi Peradaban Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengatasi Ekstremisme dan Intoleransi Beragama. 2012. [https://www.unaoc.org/wp-content/uploads/2012/12/Anddresing-Religious-Ekstremism-and-Intolerance .pdf](https://www.unaoc.org/wp-content/uploads/2012/12/Anddresing-Religious-Ekstremism-and-Intolerance.pdf)
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas Tahun 2022. <https://banyumaskab.bps.go.id>
- Donny Prasetyo, Irwansyah. Memahami Masyarakat dan Perspektifnya. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan Sosial, Vol. 1, Issue 1, Januari 2020. <https://dinastirev.org/JMPIS>
- Juwaini, dkk, Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural. Aceh: Bandar Publishing, 2023.
- E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep implementasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Fauziah Nurdin. Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. JURNAL ILMIAH AL MU'ASHIRAH: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif Vol. 18, No. 1, Januari 2021.
- Hassan Shaddy, dkk, Ensiklopedia Indonesia. Ichtisar Baru-Van Hoeve, Jakarta.

- Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Lexy J. *Moleong*. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karta, 2000.
- M. Djundi Ghony dan Fauzan Almanshur. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Mhd. Abror. MODERASI BERAGAMA DALAM BINGKAI TOLERANSI: Kajian Islam dan Keberagaman. RUSDIYAH Jurnal Pemikiran Islam Volume 1 Nomor 2, Desember 2020. <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2i.174>
- Mohamad Fahri, Ahmad Zainuri. Moderasi Beragama di Indonesia. Intizar Vol. 25. No. 2. Desember 2019.
- Moleong, L. J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020.
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nana Sujana. Menyusun Karya Tulisan Ilmiah, untuk Memperoleh Angka Kredit. Bandung: Sinar Baru. 1992.
- Nasution, S. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Noman Mamonto, dkk. Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (STUDI) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/21950>
- Siti Miftahul Jannah dan Muhammad Nawir. Harmonisasi Agama (Studi Kasus Koeksistensi Umat Beragama di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Jurnal Pendidikan Sosiologi. VI. Juli. 2018.

Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta, 2016.





Lampiran 1

Pedoman Wawancara

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam membangun masyarakat harmonis di kecamatan Purwokerto Timur?
2. Bagaimana pemerintah mendukung kerjasama lintas agama untuk menjaga kelancaran, keamanan, dan pengelolaan pelaksanaan ibadah?
3. Adakah inisiatif khusus atau dukungan yang diberikan untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keharmonisan di purwokerto timur?
4. Apakah ada program konkret yang dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi implementasi nilai-nilai moderasi beragama di purwokerto timur?



## Lampiran 2

### Daftar Informan Wawancara Langsung

#### DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Kristanto  
Jabatan : Kepala Camat Purwokerto Timur
2. Nama : Damar Agung  
Jabatan : Pegawai Pemerintah Kecamatan Purwokerto Timur



Lampiran 3

Hasil Dokumentasi Kegiatan

**HASIL DOKUMENTASI  
KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS**



Kantor Pemerintahan Kecamatan Purwokerto Ttimur



Wawancara bersama bapak Kristanto Kepala Camat Purwokerto Timur



Wawancara bersama bapak Damar Agung selaku pegawai Pemerintahan Kecamatan Purwokerto Timur



Upacara Bendera Para Pegawai Pemerintahan Kecamatan Purwokerto Timur



Festival Budaya dalam rangka Peringatan Hari Jadi Banyumas



Festival Kentongan dalam rangka menjaga tradisi budaya



Rapat selapanan rapat koordinasi dengan para pemerintah setempat (kelurahan, Babinsa, Babinkantibnas, serta tokoh masyarakat



Perayaan Natal Bersama Di GOR Satria

Lampiran 4  
Surat Ijin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636653  
www.uinsaizu.ac.id

Nomor : 3493 /Un.19/FD.WD.1/PP.05.3/ 12 /2023  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Purwokerto, 04 Desember 2023

Kepada Yth. :  
Camat Purwokerto Timur

Di  
Kecamatan Purwokerto Timur

**Assalamu'alaikum. Wr. Wb**

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Penelitian Mahasiswa, maka kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Ijin riset kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

1. Nama : Charis Zain Fathoni
2. NIM : 1717102066
3. Semester : 13
4. Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
5. Alamat : Jl. DR. Soeparno No.28, Purwokerto Wetan Kec. Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
6. Judul : Implementasi Nilai Moderasi Beragama dalam Membangun Masyarakat Harmonis di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Implementasi Nilai Moderasi Beragama
2. Tempat/Lokasi : Kecamatan Purwokerto Timur
3. Tanggal Riset : 04 Desember 2023
4. Metode Penelitian : Wawancara, Observasi, Dokumentasi

Kemudian atas Ijin dan perkenan Bapak/Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum. Wr. Wb**



Wakil Dekan 1

Dr. Ahmad Multaqin, M.Si

Lampiran 5

Blangko Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
 FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553  
 www.uinsaizu.ac.id

Nama : Charis Zain Fathoni  
 NIM : 1717102056  
 Fakultas/ Jurusan : Dakwah/Komunikasi dan Penyiaran Islam  
 Nama Pembimbing : Turhamun, M. S. I  
 Judul Skripsi : Implementasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Membangun Masyarakat Harmonis Di Purwokerto Timur  
 Blangko Bimbingan Skripsi :

NO.	BULAN	HARI / TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *	TANDA TANGAN**	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
	Oktober	Rabu, 4 Okt 2023	- Latar belakang BAB I		
	November	Rabu, 15 Nov 2023	- Metode penelitian BAB III		
	November	Kam, 23 Nov 2023	- Bimbingan BAB I, II, III		
	November	Senin, 27 Nov 2023	- Acc Lemprop		
	Desember	Kam, 28 Des 2023	- Bimbingan BAB IV pembahasan Penelitian		
	Januari	Jumat, 5 Jan 2024	- Bimbingan BAB V penutup		
	Januari	Senin, 22 Jan 2024	- Bimbingan BAB IV, V + Abstract		
	Januari	Senin, 29 Jan 2024	- Bimbingan: kepenulisan Skripsi dan Acc keuraian.com		

\* Diisi Pokok-pokok bimbingan  
 \*\* Diisi setiap selesai bimbingan

Purwokerto, .....  
 Pembimbing,

Turhamun, M.S.I  
 NIP. 198702022019051011

Lampiran 6  
Daftar Riwayat Hidup

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**A. IDENTITAS DIRI**

Nama : Charis Zain Fathoni  
Tempat/Tanggal : Kebumen, 06 Desember 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Pandansari Krenceng Rt. 07/02 Kec. Sruweng Kab.  
Kebumen  
Nama Ayah : Solichin  
Nama Ibu : Tri Nur Hidayah  
No. HP : 085878520968  
Alamat Email : hariszain415@gmail.com

**B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Pendidikan Formal
  - a. SDN 3 Pandansari
  - b. SMPN 3 Karanganyar
  - c. MA AL BAROKAH
  - d. UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2017-2024
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Al-Barokah 2012-2017
  - b. Pondok Pesantren Mambaul Ulum 2017-2019

**C. RIWAYAT ORGANISASI**

- a. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
- b. Dewan Eksekutif Mahasiswa
- c. Himpunan Mahasiswa Jurusan KPI
- d. IPNU